

**DISERTASI**

**MODEL KOMUNIKASI PENANGANAN KONFLIK  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

*COMMUNICATION MODEL OF CONFLICT HANDLING  
THROUGH THE EMPOWERMENT PROGRAM OF ORIGINAL  
PAPUAN PEOPLE IN TELUK BINTUNI DISTRICT*

**H A R I S  
E033202002**



**PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**MODEL KOMUNIKASI PENANGANAN KONFLIK  
MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Disertasi

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun dan Diajukan oleh:

**H A R I S  
E033202002**

**PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**MODEL KOMUNIKASI PENANGANAN KONFLIK MELALUI  
PROGRAM PEMBERDAYAAN ORANG ASLI PAPUA  
DI TELUK BINTUNI PAPUA BARAT**


Disusun dan diajukan oleh

**H A R I S**

**E033202002**

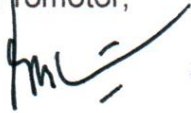
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 3 September 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Promotor,



**Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.**  
**NIP 196208182008011008**

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.**  
**NIP 196404191989032002**

Co. Promotor,



**Prof. Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si.**  
**NIP 195910011987022001**

Ketua Program Studi  
Ilmu Komunikasi,



**Dr. H. Muhammad Farid, M.Si.**  
**NIP 196107161987021001**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
**NIP 197508182008011008**



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haris

Stambuk : E033202002

Program Studi : S3 Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 September 2024

Yang menyatakan,



**Haris**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Doktor di Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Disertasi ini mengangkat judul “Model Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni”. Gagasan yang mendasari penulisan disertasi ini terilhami dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat Asli Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang masing-masing memiliki kontribusi bermakna dalam bentuk yang berbeda-beda. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, dan Dr. H. Muhammad Farid, M.Si. selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Komunikasi.

Terima kasih yang mendalam dan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. H. Andi Alimuddin Unde, M.Si.** (sebagai Promotor), **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** (sebagai Co-promotor 1), dan **Prof. Dr. Jeanny Maria Fatimah, M.Si** (sebagai Co-promotor 2). Beliau bertiga dengan kepakaran yang melekat telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui beliau bertiga dengan

kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan.

Tidak terkecuali terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para penguji yang memberi kontribusi bagi perbaikan disertasi ini sejak pada tahap proposal hingga akhir disertasi yakni: **Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M.Sc, Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum,** dan **Dr. H. Hasrullah, MA.,** serta kepada penguji eksternal yaitu Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) RI **Prof. Dr. Paiman Raharjo, MM, M.Si.,** beberapa hal terkait teori dan metodologi serta pengembangan disertasi, penulis berhutang ilmu kepada mereka.

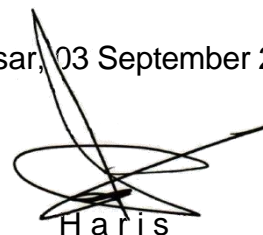
Terima kasih yang mendalam untuk dukungan dan doa dari istri tercinta, serta anak-anakku yang penuh pengertian dengan kesibukan penulis selama menyusun disertasi ini. Selama masa studi, tidak sedikit hal yang harus dikerjakan sendiri oleh istri saya: Hj. Andi Rosdiana Karumpa, SE dalam kurun waktu tertentu, dia harus melakukan peran ganda. Saya juga banyak berhutang budi dan berterima kasih kepadanya. Dalam rentang waktu tertentu juga, saya tidak bisa hadir secara utuh sebagai ayah bagi anak-anakku, Immawati Risna Jayanti dan Suaminya Firdaus, Harbianti Rina Dwi Iriani dan Suaminya Muhammad Arif, Muhammad Amirul Mukminin Tahir, Muhammad Rezki Ramadhan Tahir, Ratu Mukhstiara Roshari Haris dan Yogi Arifandi dan istrinya Darma, Gita Claudia dan Suaminya Muhammad Rayes Ibrahim dan Nabigha Aizhwara. Untuk Saudara-Saudaraku H. Muhtar HM. Tahir, Hj. Nursiyah HM. Tahir, Ramlah HM. Tahir, Farida HM. Tahir serta Bapak Ir. Petrus Kasihiw, MT (Bupati), Bapak Matret Kokop, SH (Wakil Bupati) dan, Bapak Drs. Frans Nicolas Awak (sekda) Kabupaten Teluk Bintuni serta rekan-rekan Aparatur

Sipil Negara dan honor di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama menyusun disertasi ini. Terima kasih untuk bantuan dan dukungan serta doanya yang tidak dapat saya gambarkan dengan kata-kata.

Kepada rekan-rekan selama studi: Iwan Asaad, Andi Asdar, Anil Hukma, Arif Sirajuddin, Ansar Suherman, Aulia Mahardika, A. Atrianingsi, Aditya Putra, A. Widya Warsa Syadzwin, Dian Muhtahdiah Hamna, Ichsan Muhammad Abduh, Muh. Rayes Ibrahim, Sennahati, penulis harus berterima kasih untuk hari-hari dan diskusi renyah yang sulit terulang lagi. Kepada rekan saya, juga kepada seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta staf pascasarjana Universitas Hasanuddin, terima kasih bantuannya sejak awal hingga akhir masa studi. Tampaknya saya tidak dapat menyebutkan satu per satu lagi. Terlalu banyak nama yang memberikan kontribusi kepada penulis hingga mencapai tahap ini. Sekali lagi, terima kasih.

Terakhir, ucapan terima yang tulus disertai doa tiada hentinya kepada ayahanda tercinta H. Muhammad Tahir (almarhum) dan ibunda Siti Toyibah (almarhumah) yang tidak sempat menyaksikan penulis sampai pada tahap ini, disertasi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua sebagaimana harapan mereka kepada penulis.

Makassar, 03 September 2024



Haris



## ABSTRAK

Haris. E033202002. **Model Komunikasi Penanganan Konflik melalui Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Teluk Bintuni.** Disertasi dibimbing oleh Andi Alimuddin Unde, Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Jeanny Maria Fatimah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model komunikasi penanganan konflik melalui program pemberdayaan orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat orang asli Papua (OAP), perwakilan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni serta Anggota Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRP PB) semua berjumlah 24 (dua puluh empat) orang. Hasil penelitian ini menemukan model komunikasi tripartite untuk penanganan konflik di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu komunikasi pemerintah dengan tokoh-tokoh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai pemuka pendapat (opinion leader) dengan masyarakat asli Papua yang kolaboartif dan dapat dipahami oleh masing-masing stakeholder sehingga dapat menyelesaikan konflik di Papua khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

**Kata kunci:** Model komunikasi tripartite, Penanganan konflik, Bersama pemerintah, Opinion leader dan Orang Asli Papua.





## ABSTRACT

Haris. E033202002. **Communication Model for Handling Conflict through Empowering Indigenous Papuans (OAP) in Teluk Bintuni Regency**. The dissertation was supervised by Andi Alimuddin Unde, Dwia Aries Tina Pulubuhu, and Jeanny Maria Fatimah.

*This research aims to determine the communication model for handling conflict through the indigenous Papuan empowerment program in Teluk Bintuni Regency, using qualitative research methods, namely conducting interviews with indigenous Papuan community leaders (OAP), government representatives and members of the Regency Regional People's Representative Council (DPRD). Bintuni Bay and the members of the Papuan People's Assembly for West Papua (MRP PB) total 24 (twenty four) people. The results of this research found a tripartite communication model for handling conflict in Teluk Bintuni Regency, namely government communication with Indigenous Community Institution (LMA) figures as opinion leaders (opinion leaders) with the indigenous Papuan community which is collaborative and can be understood by each stakeholder so that it can resolve conflicts in Papua, especially in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province.*

**Key words:** *Tripartite communication model, Conflict management, Together with the government, Opinion leaders and Native Papuans.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	38
C. Tujuan Penelitian.....	39
D. Manfaat Penelitian.....	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	41
A. Kajian Konsep .....	41
B. Teori Komunikasi Pembangunan.....	43
C. Tujuan Komunikasi.....	45
D. Syarat Komunikasi .....	45
E. Macam-macam Komunikasi.....	47
F. Pemberdayaan Masyarakat.....	53

G.	Komunikasi dan Pemberdayaan .....	56
H.	Teori Resolusi Konflik Johan Galtung .....	76
I.	Teori <i>Two Step Flow</i> (Teori Komunikasi Dua Tahap)...	78
J.	Teori Pemuka Pendapat ( <i>Opinion Leader Theory</i> ).....	84
K.	Strategi Komunikasi Program Pemberdayaan Orang Asli Papua .....	109
L.	Teori dan Model .....	112
M.	Penelitian yang Relevan .....	117
N.	Kerangka Pikir .....	124
O.	Definisi Operasional .....	125
BAB III	METODE PENELITIAN .....	131
A.	Paradigma Penelitian .....	131
B.	Metode Penelitian .....	135
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	139
D.	Subjek Penelitian .....	139
E.	Sumber Data .....	142
F.	Teknik Pengumpulan Informasi .....	143
G.	Teknik Analisis Wawancara .....	146
H.	Pemeriksaan Keabsahan Informasi .....	149
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	151
A.	Gambaran Umum Sejarah Konflik Papua .....	151
B.	Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) .....	153
C.	Kelompok-Kelompok Politik Papua Merdeka .....	159

D.	Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).....	160
E.	KKB Papua Sulit Diberantas.....	169
F.	Pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemberdayaan OAP.....	170
	1. Topografi dan Tata Guna Lahan .....	174
	2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	178
	3. Komposisi dan Distribusi Penduduk.....	183
	4. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat.....	189
	5. Indeks Pembangunan Manusia.....	202
	6. Ketahanan Pangan Masyarakat.....	206
	7. Kondisi Ekonomi dan Sumber Mata Pencaharian Masyarakat.....	208
	8. Jalan dan Kondisi Transportasi.....	214
	9. Perumahan dan Pemukiman Masyarakat.....	219
	10. Kondisi Sosial Masyarakat .....	221
	11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	225
	12. Produktivitas Total Daerah .....	228
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	238
A.	Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) .....	238
B.	Pandangan Masyarakat Tentang Konflik di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat .....	239
C.	Peranan <i>Opinion Leader</i> dalam Penanganan Konflik ...	244

D.	Model Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) .....	247
E.	Komunikasi dan Keadilan Penting Untuk Penanganan Konflik .....	250
F.	Program Pemberdayaan Orang Asli Papua sebagai Pemicu Konflik .....	254
G.	Regulasi dan Pemberdayaan OAP untuk Penanganan Konflik .....	257
H.	Komunikasi dalam Investasi untuk Pemberdayaan OAP	258
I.	Program Pemberdayaan untuk Kemajuan OAP .....	260
J.	Komunikasi dan Keadilan untuk Kesejahteraan OAP ...	261
K.	Pembinaan dan Pendampingan untuk Kemajuan OAP	263
L.	Komunikasi Efektif untuk Pemberdayaan OAP .....	264
M.	Strategi Komunikasi dalam Program Pemberdayaan untuk Penanganan Konflik .....	268
N.	Model Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua .....	271
O.	Komunikasi Tripartite (Temuan Penelitian).....	304
BAB VI	PENUTUP .....	306
	A. Kesimpulan .....	306
	B. Saran .....	310
	DAFTAR PUSTAKA .....	312
	DOKUMENTASI PENELITIAN .....	319
	RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	328

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kerangka Resolusi Galtung.....	78
Tabel 2.2	Perbedaan Teori dan Model.....	116
Tabel 2.2	Penelitian Penanganan Konflik Sebelumnya .....	117
Tabel 3.1	Pedoman Penelitian Fenomenologi konflik.....	144
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Distrik, 2020.....	173
Tabel 4.2	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Teluk Bintuni, 2018 .....	174
Tabel 4.3	Nama dan Ketinggian Gunung Menurut Distrik, 2018 .....	176
Tabel 4.4	Jenis Tata Guna Lahan Menurut Kesepakatan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2018-2020 .....	177
Tabel 4.5	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni .....	181
Tabel 4.6	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Menurut Distrik, 2020 .....	186
Tabel 4.7	Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020 .....	193
Tabel 4.8	Kontribusi PDRB AHB Menurut Lapangan Usahadi Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020 (persen) .....	197
Tabel 4.9	Struktur Perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (persen), 2016-2020 .....	200
Tabel 4.10	Komponen IPM Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat, 2020 .....	204
Tabel 4.11	Perkembangan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2014-2020 .....	215
Tabel 4.12	Kondisi Jalan di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016- 2020 .....	216
Tabel 4.13	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Perumahan Tahun 2019 .....	220

Tabel 4.14	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2017-2020 .....	228
Tabel 4.15	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Teluk Bintuni (Rp miliar), 2016-2020 .....	230
Tabel 4.16	Panjang Jalan, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020 .....	231
Tabel 5.1	Informan Penelitian .....	240
Tabel 5.2	<i>Output</i> Komunikasi Penanganan Konflik .....	269
Tabel 5.3	<i>Outcome</i> Komunikasi Penanganan Konflik .....	270
Tabel 5.4	Matrik Model Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Kajian SOAR .....	280
Tabel 5.5	Tahapan Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Program Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) .....	285



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Two Step Flow Modle</i> .....	79
Gambar 2.2	Posisi Pemuka Pendapat dalam Komunikasi Dua Tahap dan Multi Tahap .....	89
Gambar 2.3	Model Proses Komunikasi Tradisional.....	97
Gambar 2.4	SOAR Framework.....	111
Gambar 2.5	Model Analisis SOAR Instrumen analisis .....	111
Gambar 2.6	Model Komunikasi Intrapersonal.....	114
Gambar 2.7	Kerangka Pikir .....	124
Gambar 3.1	Kerangka analisis interaktif (Miles dan Huberman) .....	147
Gambar 4.1	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Teluk Bintuni.....	171
Gambar 4.2	Persentase Wilayah Menurut Kondisi Topografi, 2018 ..	175
Gambar 4.3	Persentase Wilayah Menurut Kondisi Kelerengan .....	176
Gambar 4.4	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni, 2010-2020 .....	185
Gambar 4.5	Piramida Penduduk Kabupaten Teluk Bintuni, 2020 .....	188
Gambar 4.6	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020 .....	191
Gambar 4.7	Perkembangan Nilai PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Teluk Bintuni (miliar rupiah), 2016-2020 .....	192
Gambar 4.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020 .....	195
Gambar 4.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Teluk Bintuni ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020 .....	196
Gambar 4.10	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Teluk Bintuni (Ribu Rupiah), 2016-2020 .....	202

Gambar 4.11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2020 .....	205
Gambar 4.12 Perkembangan Persentase Angka Melek dan Buta Huruf di Kabupaten Teluk Bintuni (persen), 2015-2019 .....	205
Gambar 4.13 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020 .....	207
Gambar 4.14 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Teluk Bintuni, 2016-2020 .....	209
Gambar 4.15 Capaian Regional Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Provinsi Papua Barat, 2020 .....	209
Gambar 4.16 Perkembangan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Teluk Bintuni Per Pilar, 2016-2020 .....	210
Gambar 4.17 Persentase Jalan Menurut Kondisi Jalan, 2018 .....	215
Gambar 4.18 Peta Jasa Ekosistem Luasan Wilayah Produktif di Kabupaten Teluk Bintuni .....	233
Gambar 5.1 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni .....	252
Gambar 5.2 <i>SOAR Framework</i> .....	272
Gambar 5.3 Model Analisis SOAR .....	274
Gambar 5.4 Matrix SOAR .....	279
Gambar 5.5 Model Komunikasi Penyusunan Program Pemberdayaan .....	286
Gambar 5.6 <i>Two Step Flow Modle</i> .....	290
Gambar 5.7 Komunikasi Triparti (Temuan Penelitian) .....	305

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Operasi Trikora merupakan awal konflik di Papua setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, akibat dari kegagalan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang digelar pada tahun 1949 silam. Dikutip dari situs Kemdikbud dalam Widhia Arum Wibawana, Detik News (2023), konferensi awalnya menghasilkan kesepakatan bahwa Irian Barat (Papua) akan ditentukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pengakuan kedaulatan.

Kenyataan yang terjadi bahwa banyak perundingan, oleh pihak Belanda tidak menunjukkan itikad untuk menyelesaikan masalah Irian Barat tersebut, hingga menemui jalan buntu. Hal ini membuat Indonesia melakukan perjuangan melalui beberapa jalur diplomasi, termasuk dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung dan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi dukungan terhadap Indonesia untuk menjadikan Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menghadapi permasalahan tersebut Dewan Pertahanan Nasional Indonesia pada tanggal 14 Desember 1961, merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora, yang kemudian Trikora ini diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta (bekas Ibu Kota Republik Indonesia).

Trikora atau Tri Komando Rakyat yang merupakan puncak atau langkah terakhir perjuangan pembebasan Irian Barat (Papua) dalam politik konfrontasi itu selengkapnya disampaikan Presiden Soekarno. Berikut isi dan tujuan Trikora: Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonial; Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Jaya tanah air Indonesia; Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Sebagai tindak lanjut Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962 Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar KOTI Pembebasan Irian Jaya (Papua) mengeluarkan Keputusan Presiden No. I Tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala. Dengan Panglima Komando adalah Mayor Jenderal (Mayjen) Soeharto.

Indonesia dan Belanda Pada tanggal 15 Agustus 1962, kembali bertemu dalam perundingan ini dikenal dengan nama "Perjanjian New York". Perundingan ini menghasilkan keputusan yang berisi bahwa Belanda harus menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963. Selanjutnya untuk menjaga keamanan di Irian Barat, diberikan Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA) di bawah pimpinan Jalal Abdoh dari Iran. Akhirnya tepat pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat (Papua) berhasil diserahkan kepada Pemerintah Indonesia.

Setelah kembalinya Irian Barat (Papua) dalam NKRI, muncul kelompok yang menolak masuknya Irian Barat (Papua) dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia, kelompok itu adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM), pada 1 Desember 1963. OPM awal mulanya merupakan gerakan spiritual kargonisme yang menggabungkan kristiani dan kepercayaan adat yang dibentuk kepala distrik Demta, Aser Demotekay, yang bertujuan melarang kekerasan dan selalu bertindak kooperatif dengan pemerintah Indonesia, walaupun ada kelompok OPM pimpinan Jacob Prai melanjutkan gerakan dengan cara kekerasan. Selain itu pada tahun 1964, muncul kelompok kedua dari Manokwari yang dipimpin Terianus Aronggear. Kelompok tersebut mendirikan Organisasi Perjuangan Kemerdekaan Negara Papua Barat yang dikenal sebagai OPM bertujuan meminta PBB untuk meninjau Kembali persetujuan New York yang menyatakan bahwa seluruh tanah Hindia Belanda adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kelompok kedua ini menyuarakan tuntutan kemerdekaan Papua, sehingga sampai saat ini berkembang menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan tersebar hampir di seluruh tanah Papua untuk memperoleh kemerdekaan dan dukungan dunia internasional, karena kelompok OPM berpendapat bahwa kemerdekaan Papua dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan catatan akhir tahun 2023 satuan Tugas Operasi Damai Cartenz (Kompas, 25 Desember 2023) bahwa ada 209 peristiwa kekerasan bersenjata dan politik dengan menelan korban jiwa

sebanyak 79 orang tewas terdiri dari 37 warga sipil, 20 orang prajurit TNI, 3 orang anggota Polri, serta 19 orang anggota KKB.

Kemakmuran dan kesejahteraan dapat menjadi solusi konflik menjawab tujuan KKB atau OPM, sehingga pemerintah Indonesia memusatkan perhatian pembangunan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

Usaha pemerintah Indonesia untuk mengakhiri konflik di Papua adalah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi mulai dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Papua, serta yang terakhir Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Peraturan Presiden Nomor 121 tersebut disambut baik oleh orang asli Papua. Mereka tahu bahwa dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut untuk mendorong percepatan pembangunan di Tanah Papua sebagai bentuk kebijakan baru, sebagaimana diungkapkan oleh Agustinus Orocomna selaku Ketua Forum Anak-anak Asli 7 Suku Peduli Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Bintuni yang dikutip dari media Online Jaga Indonesia (Jumat, 4 November 2022). Menilai bahwa Peraturan Presiden nomor 121 Tahun 2022 tersebut merupakan bentuk kepedulian negara Republik Indonesia untuk benar-benar menyejahterakan orang asli Papua lewat kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Oleh

karenanya, Agustinus mengajak seluruh lapisan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk mendukung kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua demi kepentingan pemberdayaan orang asli Papua.

Pemberdayaan merupakan paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat Pembangunan (*people-centered development*), sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026. Selanjutnya masyarakat yang berdaya dan maju serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dipandang sebagai ukuran pemberdayaan dalam program pembangunan.

Penempatan manusia atau penduduk sebagai sasaran akhir (*the ultimated end*), sementara upaya pemberdayaan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu daerah, sehingga perlu disampaikan kepada semua yang berkepentingan, terutama kepada masyarakat supaya dapat mengetahui dan memahami tentang perkembangan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meminimalisir kesalahan penafsiran tindakan provokatif dari kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan yang berbeda dari tujuan pembangunan itu sendiri yang dapat menimbulkan konflik di daerah.



Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dapat menjadi issue tersendiri yang dapat menimbulkan konflik seperti yang terus dipublikasikan oleh kelompok separatis di Papua, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni provinsi Papua Barat karena IPM merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan oleh penduduk dengan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, IPM juga merupakan inti dan tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026, perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan dihitung dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan keadaan pasar.

Selanjutnya menurut UNDP juga dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026, IPM suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kategori sangat tinggi didapatkan apabila  $IPM \geq 80$ , kategori tinggi apabila IPM berada diantara  $\leq 70 - < 80$ , termasuk dalam kategori sedang apabila IPM antara  $\leq 60 - < 70$ , dan masuk kategori rendah jika  $IPM < 60$ . Selama periode 2016-2020, perkembangan IPM Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren yang positif terlihat dari peningkatan setiap tahun, dan masuk dalam kategori

sedang. Sehingga, masih dimungkinkan adanya peningkatan IPM ke depannya. Pemahaman tentang pemberdayaan sebagai sumber konflik khususnya di kalangan orang asli Papua berdasarkan IPM tahun 2016, Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 61,81 dan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2020 mencapai 64,55 sebagaimana data berikut ini.

Perbandingan IPM Provinsi Papua Barat, pada tahun 2020 dengan IPM Kabupaten Teluk Bintuni 64,55 lebih rendah dari IPM Provinsi Papua Barat yang mencapai 65,09, (RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026), selanjutnya berdasarkan komponen penyusunannya angka harapan hidup di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 60,60, harapan lama sekolah sebesar 12,17 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,95 tahun dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebesar 9.821,00 rupiah.

Seluruh komponen tersebut, usia harapan hidup dan harapan lama sekolah Kabupaten Teluk Bintuni lebih rendah jika dibandingkan dengan komponen penyusun IPM Provinsi Papua Barat. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Posisi IPM tertinggi ditempati oleh Kota Sorong dengan IPM sebesar 78,45, Kabupaten Manokwari sebesar 72,01, Kabupaten Fakfak sebesar 68,36, dan Kabupaten Sorong sebesar 65,74. Sementara itu kabupaten di Provinsi Papua Barat dengan IPM terendah diduduki oleh Kabupaten Tambrauw sebesar 53,45. cenderung fluktuatif.

Indek Pembangunan Manusia memiliki kaitan dengan angka harapan hidup. Perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup menjadi indikator untuk mengevaluasi sukses dan tidaknya program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan umur panjang.

Angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Teluk Bintuni selama periode 2016-2020 juga cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, AHH di Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 59,48 tahun, kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 60,83 tahun pada tahun 2019, namun mengalami penurunan di Tahun 2020 menjadi 60,60 tahun (RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026). AHH sebesar 60,60 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjalani hidup selama 60 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kabupaten Teluk Bintuni tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat. Sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat,

AHH Kabupaten Teluk Bintuni masih berada di bawah AHH Provinsi Papua Barat yang pada tahun 2020 mencapai 65,9 tahun.

Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Teluk Bintuni menempati posisi ketiga terbawah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Papua Barat. Sedangkan AHH tertinggi diduduki oleh Kota Sorong yaitu mencapai 70,46 tahun, disusul Kabupaten Manokwari dengan AHH sebesar 68,56 tahun, dan Kabupaten Fakfak sebesar 68,41 tahun. Walaupun demikian, enam dari 13 kabupaten/kota memiliki AHH di atas AHH Provinsi Papua Barat yang mencapai 65,9 tahun. Posisi terendah adalah Kabupaten Teluk Wondama dengan AHH sebesar 59,93 tahun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat digambarkan dengan laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja maupun distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Selain itu, dapat pula dilihat apakah pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya peningkatan pendapatan penduduk akan mengarah kepada pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menggambarkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan pengangguran. Dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026, TPAK Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2017 adalah sebesar 68,54 persen, kemudian meningkat menjadi sebesar 71,84 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 67,09 persen dan kembali meningkat menjadi 69,44 persen di tahun 2020. Sedangkan 30,56 persen dari penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan penduduk bukan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang kegiatan utamanya selama referensi pencacahan adalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Teluk Bintuni. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Lebih dari itu, jika dilihat menurut gender terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2020 mencapai 33,97 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 16,92 persen. Selisih yang cukup jauh antara TPAK laki-laki dan perempuan memperlihatkan bahwa secara umum kesempatan

penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dibanding penduduk perempuan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kabupaten Teluk Bintuni adalah kaum laki-laki.

Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, TPAK Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 69,44 persen berada sedikit di bawah TPAK Provinsi Papua Barat yang mencapai 69,55 persen, dan berada pada posisi keempat terbawah dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Provinsi Papua Barat. TPAK tertinggi di Papua Barat ditempati oleh Pegunungan Arfak dengan TPAK sebesar 95,37 persen. Posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Maybrat dengan TPAK masing-masing sebesar 82,74 dan 78,24 persen. Terdapat empat daerah yang memiliki TPAK masih di bawah TPAK Provinsi Papua Barat dengan TPAK terendah yakni di Kota Sorong dengan persentase sebesar 62,77 persen.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk usia kerja yang tidak punya pekerjaan dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja (bps.go.id).

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang

tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2016-2020, TPT Kabupaten Teluk Bintuni cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, angka TPT di Kabupaten Teluk Bintuni mencapai angka 7,62 persen. TPT di Kabupaten Teluk Bintuni mengalami penurunan menjadi 5,93 persen di tahun 2018 dan meningkat menjadi 8,03 persen pada tahun 2019. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,66 menjadi 4,37 persen. Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 3,41 persen dan 0,96 persen. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026.

Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 8,03 persen, berada di atas TPT Provinsi Papua Barat sebesar 6,24 persen, dan merupakan 3 daerah dengan TPT tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat. Selain kabupaten/kota yang mencapai persentase TPT di atas TPT Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak dan Kota Sorong



dengan masing-masing TPT sebesar 11,08 dan 9,55 persen. Sedangkan daerah yang memiliki TPT terendah yakni Pegunungan Arfak dengan persentase sebesar 0,21 persen.

Perbandingan rasio penduduk bekerja laki-laki dan Perempuan tahun 2020 hampir sama, masing-masing mencapai 89,96 persen dan 94,35 persen, Hal ini mencerminkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama. Namun demikian, pada kenyataannya penambahan persediaan lapangan pekerjaan tidak secepat pertumbuhan jumlah angkatan kerja, sehingga jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat.

Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan dari sekian banyak para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

Peningkatan PDRB yang dihasilkan per tenaga kerja cenderung mengalami peningkatan, dari 381.069 (2016) menjadi 390.360 (2020). Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja selama periode tersebut cenderung fluktuatif meskipun data yang disajikan tidak lengkap. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja adalah

sebesar 2,71 persen, kemudian naik menjadi 5,25 persen pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,06 persen di tahun 2020, sebagaimana tercatat dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026.

Istilah kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan semua lapangan pekerjaan yang masih dapat diisi. Akan tetapi, karena data kesempatan kerja sulit diperoleh, maka digunakan pendekatan bahwa kesempatan kerja didefinisikan sebagai banyaknya lapangan kerja yang terisi, yang tercermin dari persentase penduduk yang bekerja dari total seluruh angkatan kerja yang tersedia.

Dalam hal ini, seseorang dikategorikan bekerja apabila dia melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam kurun waktu seminggu sebelum pencacahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yaitu porsi penduduk yang termasuk angkatan kerja yang terserap dalam pasar kerja. TKK Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2020 mencapai angka 93,13 persen.

Tingginya kesempatan kerja di Kabupaten Teluk Bintuni disebabkan karena sektor pertanian yang menjadi salah lapangan usaha utama

penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni, yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi tanpa adanya persyaratan ketrampilan atau pendidikan khusus. Jika dilihat dari sisi gender, dapat dilihat bahwa TKK laki-laki dengan TKK perempuan nilainya tidak berbeda terlalu jauh, yaitu masing-masing sebesar 95,61 dan 88,28 persen. Hal ini menegaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan partisipasi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dikatakan seimbang.

Pekerjaan penduduk dapat diklasifikasikan berdasarkan status utama. Jumlah pekerja di Kabupaten Teluk Bintuni yang didasarkan pada status utama pekerjaan mereka, meliputi pekerja berusaha sendiri, pekerja berusaha bebas, dan pekerja keluarga. Jumlah pekerja berusaha sendiri pada tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Teluk Bintuni cenderung mengalami peningkatan meskipun terjadi satu kali penurunan pada tahun 2017.

Sedangkan jumlah pekerja berusaha bebas cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 2.235 orang, kemudian naik menjadi 2.783 orang di tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 pekerja bebas turun tajam menjadi 496 orang, kemudian dua tahun berikutnya terus mengalami peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 1.631 orang dan 1.680 orang. Berbeda dengan jumlah pekerja keluarga yang justru terus mengalami penurunan selama tahun 2016-2019, tetapi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 3.554 orang.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang dimaksud dengan keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I yang disebut sebagai indikator “kebutuhan dasar” keluarga. Keluarga sejahtera I merupakan keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal namun belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Dengan kata lain, keluarga sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera I tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau disebut dengan indikator “kebutuhan psikologis” keluarga. Kedua indikator tersebut (indikator dasar keluarga dan indikator kebutuhan psikologis keluarga) merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada keluarga sejahtera II, kebutuhan fisik dan sosial-psikologis telah terpenuhi, namun kebutuhan untuk pengembangan belum terpenuhi, seperti kebutuhan menabung.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Kabupaten Teluk Bintuni dihimpun dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari ketiga sumber tersebut, dapat dihitung seberapa

besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2016, persentase PAD terhadap total pendapatan dalam RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021-2026, adalah sebesar 2,86 persen, namun mengalami penurunan dua kali berturut-turut menjadi 2,11 persen pada tahun 2017 dan 1,34 persen di tahun 2018. Pada tahun 2019, persentase PAD mengalami peningkatan menjadi 1,70 persen, dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 2,10 persen.

Berdasarkan data-data di atas, pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua sangat signifikan, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pembangunan yang dilakukan oleh Republik Indonesia di kabupaten Teluk Bintuni, termasuk pemberian Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni yang dapat mendorong meningkatnya IPM dengan pertumbuhan ekonomi melalui program pemberdayaan masyarakat, namun demikian masih terjadi konflik karena model komunikasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya orang asli Papua belum tepat.

Komunikasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan terutama dalam kehidupan masyarakat modern sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama studi tentang model komunikasi menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu obyek kajian penting.

Dinamika kehidupan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat yang menunjukkan tentang kemampuan masyarakat telah memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan studi model komunikasi. Proses komunikasi akan menghasilkan suatu model yang dapat dijadikan dasar bagi seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan.

Interaksi masyarakat memerlukan ilmu pengetahuan yang dapat memberi pemahaman komunikasi dengan baik, sehingga ilmu pengetahuan tentang pentingnya komunikasi pemberdayaan masyarakat harus meluas dan mendalam, khususnya menyangkut makna manusia yang berdaya atau yang memiliki kemampuan.

Melalui komunikasi juga dapat memberikan kekuatan dan dorongan moril pada seseorang bahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggerakkan cara-cara untuk memperbaiki kehidupan sehingga memiliki kemampuan berdaya saing pada berbagai sektor kehidupan.

Masyarakat yang berdaya merupakan kondisi kehidupan yang dibutuhkan oleh semua orang sebagai indikator masyarakat yang sejahtera dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri serta memiliki kontribusi yang besar dalam mengisi pembangunan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan program utama dalam setiap tahap dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Masyarakat yang sejahtera condong pada suasana kehidupan yang tenang dan damai. Sementara masyarakat yang miskin atau tertinggal berpeluang berada dalam suasana konflik, bahkan bisa diliputi perpecahan yang menyebabkan

korban harta benda hingga nyawa manusia menjadi taruhannya. Dalam konteks itulah, model komunikasi dalam pemberdayaan menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, sehingga mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Issue tentang kehidupan masyarakat yang tertinggal atau terbelakang ataupun miskin dapat menjadi sumber konflik. Tingkat kriminal yang tinggi termasuk munculnya isu-isu kesejahteraan berpeluang melahirkan gerakan separatis seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Akibatnya, konflik di daerah itu tak pernah benar-benar berakhir. Padahal pemerintah telah berupaya meningkatkan derajat masyarakat melalui berbagai program, seperti menjadikan Papua sebagai daerah otonomi khusus. Selain itu, pemerintah juga mengucurkan dana dengan jumlah yang sangat besar. Berbagai langkah tersebut belum mampu meredam konflik di Papua dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi isu utama sebagai pemicu konflik.

Kabupaten Teluk Bintuni yang memiliki sumber daya alam yang banyak merupakan modal investasi utama dalam pembangunan. Pembangunan dengan menggunakan model komunikasi yang tepat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia adalah melakukan perbaikan model komunikasi di bidang pemberdayaan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik.



Model komunikasi pemberdayaan masyarakat yang tepat pada dasarnya merupakan usaha yang tepat untuk mencapai masyarakat yang memahami tentang tujuan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka peran komunikasi sangat strategis. Komunikasi berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia ke arah yang positif sehingga dapat menghindari konflik. *Model menurut Littlejohn model is any symbolic representation of a thing, process, or idea dan menurut A. Lewis model is a conceptual tool which eliminates superfluous detail existing structure or processes*, dalam Cangara (2020). Artinya Model menurut Littlejohn adalah setiap representasi simbolik dari sesuatu, proses, atau ide dan menurut A. Lewis model adalah alat konseptual yang menghilangkan detail berlebihan dari struktur atau proses yang ada.

Sementara itu menurut Fisher dalam MAS Amin (2017), mengatakan upaya untuk menyelesaikan konflik dapat dilakukan melalui komunikasi dengan cara negosiasi. Negosiasi merupakan keterampilan yang digunakan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya *“Communications are in social life. Although communication often leads to social conflict, but its settlement through communication as well. What communication is the cause of the conflict, and what kind of communication is the solution to the conflict, and what are the dominant elements of communication required to achieve harmony in competition?. The purpose*

*of the three assessment is expected to find information that is expected to find information that is expected to be useful to predict the effect of communication that will occur when implementing communication in various fields of life, both local and global.* Artinya: “Komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun komunikasi seringkali menimbulkan konflik sosial, namun penyelesaiannya melalui komunikasi juga demikian. Komunikasi apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik, dan komunikasi seperti apa yang menjadi solusi konflik tersebut, serta unsur komunikasi apa saja yang dominan diperlukan untuk mencapai keharmonisan dalam persaingan?. Tujuan dari ketiga penilaian tersebut diharapkan dapat menemukan informasi yang diharapkan dapat berguna untuk memprediksi dampak komunikasi yang akan terjadi ketika melaksanakan komunikasi di berbagai bidang kehidupan, baik lokal maupun global”.

Merujuk pada pernyataan di atas, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Komunikasi memang bisa menjadi penyebab terjadinya konflik. Namun, komunikasi juga bisa menjadi solusi handal dan menjadi unsur paling dominan yang dibutuhkan mencapai kehidupan yang harmonis baik dalam kehidupan lokal maupun global. Keberhasilan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat memberikan kontribusi terhadap perdamaian manusia dan berdampak pada peningkatan ekonomi yang lebih baik serta kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang damai serta terbebas dari konflik, dibutuhkan model komunikasi yang tepat, yakni menyesuaikan dengan kondisi, adat istiadat dan situasi masyarakat setempat. Karena dalam menjalani kehidupannya, manusia memiliki ciri dan tata cara berkomunikasi yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan dan budaya masing-masing sehingga diperlukan pemuka pendapat (*opinion leader*).

Masyarakat yang berdaya lebih cenderung hidup dengan damai karena memiliki daya saing yang tinggi. Situasi kehidupan yang damai sangat dibutuhkan oleh negara, baik negara maju maupun negara berkembang karena dapat mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mempercepat pembangunan adalah dengan memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan. Produktivitas ekonomi individu dan negara akan meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan masyarakat.

Indonesia salah satu negara yang terus mendorong peningkatan kemampuan masyarakatnya melalui program pemberdayaan bidang perekonomian. Bersamaan dengan hal tersebut, masyarakat juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat menikmati kehidupan yang sejahtera. Tak terkecuali masyarakat Indonesia yang berada di Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat Teluk Bintuni juga turut mengikuti berbagai program pemberdayaan yang diberikan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui berbagai regulasi. Sesungguhnya, regulasi yang ada memberikan makna secara

komunikatif, dimana melibatkan semua fungsi sistem pembiayaan pusat dan daerah, baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan berbagai model komunikasi kepada semua elemen masyarakat. Komunikasi yang tepat akan menjadikan masyarakat paham dan mengikuti program pemberdayaan orang asli Papua.

Kenyataan menunjukkan bahwa penyampaian regulasi dan penerapan kebijakan tersebut kepada masyarakat belum mampu mewujudkan orang Papua menjadi sejahtera. Sebaliknya, masih terus memunculkan isu-isu baru yang mengakibatkan konflik lantaran model penyampaian informasi tersebut belum tepat. Berkaitan dengan hal tersebut, sangat dibutuhkan adanya model komunikasi yang dapat dipahami oleh orang asli Papua. Penelitian tentang model komunikasi yang tepat sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan orang asli Papua, sehingga kebijakan pembangunan dapat mewujudkan orang asli Papua yang sejahtera. Dengan tercapainya kesejahteraan, akan menjadikan orang asli Papua tenang dan damai. Dengan demikian, maka model komunikasi yang dimaksud dalam pemberdayaan orang asli Papua akan menjadi resolusi konflik di tanah Papua khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan pemahaman orang asli Papua sebagaimana diungkapkan oleh Agustinus Orocomna tersebut, perlu disampaikan dengan baik melalui model komunikasi yang dapat dipahami dan diterima oleh orang asli Papua. Dengan demikian, proses pembangunan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan

bangsa Indonesia dapat tercapai yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta menciptakan situasi dan kondisi yang aman, sejahtera, serta damai.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan layanan kesejahteraan.

Selain itu, di dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang dan Peraturan Menteri Desa Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permen Desa PDTT), nomor 17 tahun 2019 yang diganti dengan Permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa dan PDTT Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melakukan

perbaikan pembangunan di bidang ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu hidup sejahtera guna menciptakan derajat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi pemberdayaan tersebut dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari pandangan dan kebiasaan konsumtif ke paradigma ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan :

“Menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan dengan misi melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945”.

Masyarakat yang berdaya dan sejahtera merupakan investasi bagi suatu negara dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, pendapatan merupakan salah satu komponen utamanya selain pendidikan dan lainnya. Untuk mendukung pembangunan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan dan konflik sosial dan politik, pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor diperkirakan mampu menyelesaikan konflik.

Untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat tersebut, maka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus lebih

diperhatikan. Pemberdayaan masyarakat diimplementasikan melalui program dan pelaksanaan yang berkesinambungan serta dapat diterima dan dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan potensi dan tingkat Pendidikan masyarakat setempat. Selain itu, proses pemberdayaan masyarakat berkaitan pula dengan ketersediaan dana dan potensi atau peluang pekerjaan serta pasar perlu diperhatikan dengan cermat dan baik.

Untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan serta alat transportasi. Aspek paling penting lainnya adalah adanya sistem informasi dan komunikasi, karena pemberdayaan masyarakat adalah program yang saling berkaitan antara kemampuan manusia dengan fasilitas yang tersedia. Informasi dan komunikasi yang berkualitas artinya informasi yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait demi memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Informasi tersebut harus dapat dipercaya dan selalu tersedia ketika masyarakat membutuhkannya. Inilah bentuk interaksi sosial dalam komunikasi pembangunan.

Pemerintah telah berusaha mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan berbagai regulasi turunan dari seluruh kementerian dan lembaga negara. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga mengembangkan sistem informasi pembangunan di seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat maupun pemerintah daerah sampai ke desa-desa

dan kampung-kampung di seluruh Indonesia. Sistem informasi pembangunan itu membuka ruang dan peluang kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai pilihan sesuai kemampuan masing-masing.

Tak terkecuali di wilayah Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, pengembangan sistem informasi pembangunan terus dilakukan dalam rangka menghadapi isu-isu ketertinggalan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan orang asli Papua. Isu tersebut kerap dijadikan isu politik yang terus dikumandangkan oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud menimbulkan konflik yang berkepanjangan di Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), baik melalui Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN maupun melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 Pemerintah Kabupaten diwajibkan untuk mengalokasikan dana 10 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk desa atau kampung, termasuk di bidang pendidikan yaitu pendidikan yang bebas biaya atau gratis mulai dari tingkat TK sampai pendidikan menengah atas serta pemberian bantuan pendidikan kepada mahasiswa.

Selain sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah peningkatan mutu tenaga penyelenggara



pemerintahan. Salah satunya, usaha memperpendek rentang kendali melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tingkat provinsi dan kabupaten Kota. Fasilitas komunikasi, transportasi, sarana dan fasilitas pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan. Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan juga harus berkualitas. Ketika suatu negara bercita-cita untuk mencapai masyarakat yang aman dan sejahtera, maka kompetensi petugas pelayanan publik menjadi hal yang *urgen*. Kompetensi yang dimiliki oleh petugas tersebut berkontribusi secara langsung bagi pembangunan suatu negara.

Dengan menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari salah satu indikator pembangunan, maka program kesejahteraan penting diberikan kepada masyarakat. Peran pemerintah dibutuhkan untuk memberikan atau membenahi fasilitas pemberdayaan masyarakat seperti rumah layak huni, jalan, sekolah yang berkualitas, rumah sakit dan puskesmas serta akses informasi, komunikasi dan transportasi dibuka secara luas bagi masyarakat, mulai dari kota sampai ke daerah-daerah terpencil. Dengan membenahi fasilitas tersebut, diharapkan masyarakat dapat berdaya.

Pembenahan fasilitas ini juga bertujuan agar masyarakat Indonesia khususnya di Papua lebih percaya dengan bangsa Indonesia sebagai tanah air negerinya sendiri. Karena sebagian kalangan masyarakat Papua tidak percaya dengan NKRI. Mereka lebih memilih merdeka dengan meminta dukungan ke luar negeri dengan alasan yang bermacam-macam. Pada

umumnya mereka beralasan bahwa pelayanan pemerintah NKRI yang diberikan terhadap orang asli Papua tidak sepenuh hati. Bukti yang disodorkan yakni fakta dimana masih banyak orang asli Papua yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan masyarakat Indonesia di wilayah lain dalam negeri. Fasilitas layanan dan pembangunan yang serba hebat di luar Papua merupakan indikator tersendiri bagi masyarakat yang ingin merdeka. Hal inilah yang selalu dijadikan sebagai senjata ampuh untuk memprovokasi orang asli Papua hingga mendapatkan perhatian dunia internasional. Kecemburuan sosial itulah yang memicu konflik berlangsung berkepanjangan.

Selain berada dalam provokasi kelompok yang mau merdeka, pemicu konflik di Papua juga karena berkembangnya persepsi bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Provinsi Papua dinilai tidak sepenuh hati, bahkan dikatakannya minim. Tentu saja, kondisi demikian menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bangsa Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan adalah mengubah persepsi masyarakat dengan memberikan informasi ke masyarakat melalui komunikasi yang tepat. Penyebaran informasi tentang program pemberdayaan masyarakat menjadi jaminan bagi terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pemberdayaan melalui strategi komunikasi yang tepat, cermat, dan akurat adalah prasyarat yang harus dilakukan oleh pemerintah agar

program pemberdayaan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan peran komunikasi dalam menyebarkan informasi tentang tujuan pemberdayaan kepada masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang tepat, maka informasi tentang pemberdayaan masyarakat tidak akan diketahui secara luas oleh masyarakat.

Komunikasi melalui model-model komunikasi yang tepat harus terus dilakukan dalam rangka pemberdayaan orang asli Papua. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi pemahaman bahwa terjadi diskriminasi terhadap orang asli Papua. Model komunikasi yang tepat dan benar, tidak hanya memberi pemahaman yang baik kepada masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan, melainkan juga mampu meredam provokasi dari berbagai kelompok anti NKRI di Papua. Provokasi menghasilkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan konflik antar kelompok separatis dengan masyarakat dan aparat keamanan.

Komunikasi memiliki keterkaitan dengan penerapan keamanan, karena komunikasi yang baik dapat mengamankan situasi. Namun demikian diperlukan model komunikasi yang baik agar dapat menyelesaikan masalah dengan memberi pengertian melalui informasi atau pesan yang tepat saat disampaikan. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan suasana yang damai karena sangat efektif, walaupun tidak semua proses komunikasi berjalan sesuai yang diharapkan.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam pemberdayaan masyarakat. Model komunikasi yang tepat menentukan keberhasilan dan pencapaian suatu program. Pemberdayaan masyarakat akan terlaksana dengan baik apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa diperoleh melalui komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar guna mencapai tujuan organisasinya. Sebaliknya jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka tujuan program tersebut akan berantakan. Berkaitan dengan hal tersebut, peran komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting.

Berbagai studi sosial terhadap masalah konflik dan pemberdayaan orang asli Papua, pada umumnya dipahami bersumber dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas berbagai informasi pemberdayaan orang asli Papua yang mereka akses. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dan mengetahui arus informasi pemberdayaan orang asli Papua yang dikirimkan dan diterima. Dalam kaitan ini, perlu pula dipelajari komunikasi politik dan pembangunan dengan baik.

Sama halnya dengan program pemberdayaan orang asli Papua yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui dana otonomi khusus maupun melalui Dana Desa serta Alokasi Dana Desa. Meskipun telah dilaksanakan dengan baik, namun model penyampaian informasi kepada masyarakat dapat dikatakan tidak sesuai dengan tradisi

adat istiadat dan kebudayaan, terutama masyarakat kampung. Banyak yang belum mengetahui secara pasti apa dan bagaimana program pemberdayaan tersebut, terutama masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban mereka. Tidak efektifnya komunikasi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan disebabkan oleh faktor informasi, pengetahuan, kepercayaan, religiusitas, pendidikan dan pendapatan.

Faktor informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi dalam program untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua dan Papua Barat. Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya terpaaan informasi yang diterima oleh masyarakat menyebabkan mereka beranggapan bahwa tidak ada pembangunan di Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni. Masyarakat yang kurang mendapat informasi tersebut, lebih mudah dan cepat terprovokasi oleh kelompok-kelompok anti NKRI.

Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses pemberdayaan, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Menurut Van de Fliert dalam Peinina Ireine Nindatu (2019), fungsi komunikasi dalam komunikasi pembangunan terbagi dalam 5 fungsi. Pertama, komunikasi sebagai kebijakan organisasi dan pendanaan. Artinya, menjadi landasan untuk program pemberdayaan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kedua, komunikasi sebagai pendidikan, membantu perubahan dan peningkatan kapasitas pengetahuan sebagai kekuatan.

Ketiga, komunikasi berfungsi untuk berhubungan dengan masyarakat. Fungsi ini dapat dipergunakan untuk menunjukkan pada dunia luar agar mengetahui tentang sebuah organisasi atau gagasan untuk meningkatkan kesadaran dan memperoleh dukungan dari semua unsur terutama secara administratif atau tokoh publik yang memungkinkan kegiatan tersebut terjadi. Keempat, komunikasi berfungsi advokasi. Fungsi ini menyiratkan masyarakat, kelompok atau individu sebagai kekuatan penuh yang mendorong pemberdayaan. Fungsi komunikasi kelima adalah fungsi organisasi. Fungsi ini bertujuan membantu koordinasi pada semua *stakeholder* untuk mengetahui apa yang direncanakan, isu-isu, perjanjian-perjanjian, monitoring dan evaluasi, sampai program pemberdayaan dapat berjalan dengan baik tanpa ada masalah atau konflik.

Kedamaian dan kenyamanan masyarakat juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Sementara kesadaran dan nasionalisme itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Hasil penelitian Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia (2022), mengungkapkan ketidakmampuan negara dalam mengatasi ketimpangan pendidikan bukan saja merampas hak, tapi juga mengancam keberlanjutan hidup orang asli Papua (OAP). Melalui pendidikan yang baik akan mampu menaikkan derajat ekonomi masyarakat, sekaligus melindungi dan mengakui eksistensi Orang asli Papua.

Komunikasi yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam program pemberdayaan ditentukan sejumlah faktor yaitu faktor kualitas komunikasi, lingkungan keluarga dan kedekatan, pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, juga ada aspek karakteristik masyarakat sebagai faktor penunjang seperti yang meliputi faktor sosial ekonomi, demografi, dan sistem kepercayaan, dimana faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi keputusan seseorang dalam tindakan komunikasi.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi kemampuan mereka untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemberdayaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya.

Dalam program pemberdayaan orang asli Papua sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, ternyata masih belum mampu menyelesaikan masalah bahkan menambah catatan konflik. Oleh karena itu, masih diperlukan pendekatan pembangunan melalui model-model komunikasi yang baik dan efektif, baik secara linear, transaksional, interaksional. Kesemua model-model komunikasi tersebut sangat mempengaruhi resolusi konflik.

Kreatifitas kita dalam memilih dan mencari model berkomunikasi dalam pemberdayaan orang asli Papua sangat menentukan penyelesaian konflik dan tercapainya tujuan pembangunan di Papua Barat khususnya di

Kabupaten Teluk Bintuni. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini memiliki urgensi penting untuk dilakukan.

Pentingnya penelitian ini juga mengacu pada pendapat para ahli seperti diungkapkan oleh Mangkunegara bahwa ada dua tinjauan faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan komunikasi yaitu dari pihak *sender/communicator* (pengirim) dan dari pihak *receiver/communicant* (penerima). Faktor dari pihak pengirim pesan antara lain keterampilan dan sikap pengirim, pengetahuan pengirim, dan media saluran yang digunakan oleh pengirim. Sedangkan faktor dari pihak penerima pesan antara lain: keterampilan penerima, sikap penerima, pengetahuan penerima, komunikasi efektif, dan kualitas komunikasi.

Keterampilan dan sikap seorang pengirim pesan (*sender/communicator*) sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya komunikasi agar informasi yang diberikan dapat diterima oleh penerimanya dengan baik. Untuk itu, seorang komunikator harus terampil berkomunikasi dan juga kaya ide serta penuh daya kreativitas (Cangara, 2003). Selanjutnya menurut Cangara, agar penerima dapat menerima informasi dengan baik dari seorang pengirim pesan, maka harus memenuhi syarat-syarat sebelum memulai aktivitas komunikasinya di antaranya: komunikator harus mengenal diri sendiri, memiliki kepercayaan (*credibility*), daya tarik (*attractive*) dan kekuatan (*power*).



Tingkat pengetahuan dan pendidikan seorang pengirim pesan juga mempengaruhi tingkat penerimaan penerima pesan. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah jika ia memiliki pengetahuan yang luas dan tingkat pendidikan yang tinggi. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan dan pendidikan yang tinggi akan lebih mudah dalam menyusun kalimat untuk menyampaikan informasi baik secara verbal maupun nonverbal kepada komunikan. Hal tersebut juga berlaku bagi para komunikan. Seorang komunikan dapat merespon atau menginterpretasikan informasi yang diberikan komunikator dengan baik jika ia memiliki pengetahuan dan tingkat pendidikan yang baik.

Pelaksanaan pemberdayaan orang asli Papua masih sering dijumpai keluhan-keluhan dari masyarakat tentang kondisi mereka yang masih tertinggal, miskin bahkan sekarang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin ekstrim. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah masalah ketidakmampuan orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Indonesia tidak mampu mensejahterakan orang asli Papua. Padahal pada sisi yang lain, sumber daya Papua yang berlimpah terus dieksplorasi dan dieksploitasi oleh pemerintah secara besar-besaran, yang dianggap tanpa memberi manfaat kepada masyarakat Papua.

Pemahaman tersebut membumi bahkan menjadi isu nasional dan Internasional. Dampaknya, terjadi konflik horizontal dan vertikal yaitu

masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Seperti peristiwa terakhir Tahun 2022 yang terjadi di Distrik Kiwork Kabupaten Maybrat pembantaian TNI oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang menamakan diri Tentara Pejuang Merdeka (TPM) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan peristiwa yang terjadi di Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni. Konflik ini dipicu oleh ketidakpahaman masyarakat terhadap pemberdayaan orang asli Papua yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai program yang berdasarkan regulasi yang kuat dan transparan. Ketidakpahaman itu muncul lantaran model pendekatan komunikasi yang belum tepat.

Kegagalan komunikasi tersebut menyebabkan munculnya kritikan dunia Internasional terhadap Bangsa Indonesia. Tak pelak, masalah ini turut diangkat dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setidaknya ada lima kali kritikan yang diperoleh Indonesia atas Papua dari tahun 2016 hingga 2020 (Aurelia Angelina Djeen, 2022). Pertama, kritikan dari negara Kepulauan Pasifik yaitu Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Marshall. Kritikan tersebut terkait dengan catatan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di Papua Barat. Diplomat Nara Masista Rahmatia membacakan pernyataan resmi dari Joko Widodo dan berhasil menjawab kritikan tersebut.

Kedua, pada sidang umum PBB ke-72 Vanuatu tahun 2017, masih membawa permasalahan Papua walaupun dapat dijawab oleh Diplomat

Ainan Nuran. Pada tahun 2018 Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menjawab pula kritikan dalam sidang umum PBB ke-73 dengan menyatakan harus menghormati kedaulatan negara lain. Begitu juga pada sidang umum PBB ke-74 tahun 2019 dan sidang umum PBB tahun 2020, pihak HAM PBB mengangkat kasus penembakan remaja 17 tahun di gunung Lembaga Distrik Gome Papua Barat dan lain-lainnya.

Berdasarkan latar belakang dengan berbagai usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membangun Papua, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni, baik melalui program pemerintah pusat maupun melalui program pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, namun kenyataannya belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menangani konflik yang terjadi, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni melalui kajian ilmu komunikasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemetaan permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan Orang Asli Papua (OAP) terlibat dalam konflik di Kabupaten Teluk Bintuni ?
2. Bagaimana konflik yang terjadi dapat menghambat pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni ?
3. Model komunikasi pemberdayaan OAP seperti apa yang dapat menangani konflik di Kabupaten Teluk Bintuni ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis penyelesaian konflik di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni melalui model komunikasi dalam pemberdayaan Orang Asli Papua.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu temuan tentang model komunikasi untuk penyelesaian konflik dalam pemberdayaan orang asli Papua dengan dalam komunikasi berdasarkan kultur budaya orang asli Papua, baik secara konseptual maupun secara praktis, untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam resolusi konflik di tanah Papua. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan kajian tentang konflik yang melibatkan orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Melakukan kajian tentang konflik yang menghambat pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Menemukan model komunikasi penanganan konflik melalui program pemberdayaan OAP di Kabupaten Teluk Bintuni.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan tentang model komunikasi dalam pemberdayaan orang asli Papua, sekaligus sebagai resolusi konflik di Papua Barat khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat khusus orang asli Papua.

### **b. Bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.**

Memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai pedoman dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

### **c. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan orang asli Papua dengan menggali dimensi-dimensi lain dari komunikasi penanganan konflik dan aspek sosiodemografis, ekonomi serta politik yang berhubungan dengan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), khususnya di kabupaten Teluk Bintuni.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Konsep**

Cangara (2020: 347) model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu gambaran yang memiliki *input* informasi, prosesor informasi dan *output* dari hasil yang diharapkan, sehingga model komunikasi adalah gambaran dari suatu representasi proses komunikasi yang menjelaskan keterlibatan sejumlah elemen atau unsur yang berinteraksi satu sama lainnya dalam suatu kegiatan komunikasi, selanjutnya Cangara (2020: 348), mengatakan bahwa model itu sama dengan teori, sehingga menjelaskan sebuah model itu sama dengan berteori.

Pemberdayaan sebagai bagian dari pembangunan perlu melibatkan atau berdampak pada masyarakat, apalagi pembangunan kota-kota satelit atau kawasan industri seperti yang dilakukan di Tanah Papua termasuk Kabupaten Teluk Bintuni diketahui perlu memperhatikan masyarakat sekitar, karena bisa menimbulkan konflik-konflik sosial, sebagaimana dijelaskan dalam buku Perencanaan dan Strategi Komunikasi, Cangara (2017 :195). Sehingga pembangunan perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan, baik terpelajar maupun tidak, yang kaya atau miskin, pejabat, politisi ataupun rakyat biasa dengan berbagai strategi komunikasi, sebagaimana diuraikan dalam buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek Cangara (2006:35). Van de Fliert dalam

uraian Peinina Irene Nindstu (2019), menjelaskan fungsi komunikasi pembangunan, yaitu komunikasi kebijakan, komunikasi pendidikan, komunikasi hubungan masyarakat dan strategi komunikasi advokasi dan komunikasi organisasi, maka fungsi-fungsi tersebut dilakukan untuk penguatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wilbur Schramm, sebagaimana dikutip oleh Nahdiana (2022), komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tanpa komunikasi masyarakat tidak akan terbentuk, demikian pula sebaliknya manusia tidak bisa mengembangkan komunikasi tanpa masyarakat.

Komunikasi berasal dari bahasa Latin "*communis*" artinya bersama. Secara terminologis, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran atau informasi (pesan) dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu media. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi, baik berupa pesan, ide, dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi tertentu. Komunikasi selain dengan cara verbal, komunikasi juga bisa dilakukan dengan bahasa tubuh atau menggunakan *gesture* untuk tujuan tertentu. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua pihak penerima dan pemberi komunikasi (Daryanto, 2014).

## B. Teori Komunikasi Pembangunan

Menurut Cangara (2020: 417) dalam buku Komunikasi Pembangunan, pemberdayaan adalah istilah lainnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan dalam sejumlah cara yang berbeda, dengan mengungkapkan juga pendapat Narayan yang mendefinisikan "Pemberdayaan adalah perluasan asset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi dengan mempengaruhi, mengendalikan, dan memegang lembaga yang bertanggung jawab. Cangara, (2020: 347-382) ada 10 (sepuluh) model komunikasi pembangunan, terdiri dari :

1. Model komunikasi dua tahap dan multistahap.
2. Model Komunikasi memudarnya masyarakat tradisional.
3. Model komunikasi dialogis.
4. Model komunikasi difusi inovasi.
5. Model komunikasi AIDDA (*Awareness/Kesadaran, Interest/ Perhatian, Desire/Keinginan, Decision/Keputusan, Action/ Pelaksanaan*).
6. Model komunikasi ACDC (*Appropriate Communication for Development of Communities*) lebih dikenal dengan istilah komunikasi tepat guna.
7. Model komunikasi perubahan berbasis KAP (*Knowledge, Attitude dan Practice*).
8. Model komunikasi untuk advokasi, komunikasi aksi strategis untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah kebijakan yang merugikan masyarakat.



9. Model komunikasi pemasaran sosial, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran khalayak pada hal-hal yang berkaitan masalah orang banyak.
10. Model komunikasi mobilisasi sosial, yaitu gerakan komunikasi berskala luas untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan tertentu melalui upaya mandiri.

Selain itu ada beberapa model komunikasi pembangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. Model S-R

Model S-R atau stimulus-respon adalah model komunikasi yang paling dasar. Model stimulus ini dipengaruhi oleh disiplin ilmu psikologi, terutama yang beraliran behavioristik. Model S-R memberitahukan bahwa komunikasi sebagai aksi reaksi yang sederhana.

2. Model Aristoteles

Model komunikasi Aristoteles terjadi ketika seorang pembicara berbicara kepada khalayak untuk mengubah sikap mereka. Komunikator akan mengemukakan tiga unsur dasar dalam komunikasi ini yaitu pembicara, pesan, dan pendengar.

3. Model *Lasswell*

Model ini mengutarakan tiga fungsi komunikasi yaitu: pengawasan lingkungan, korelasi berbagai bagian yang terpisah dalam masyarakat untuk merespon lingkungan, dan transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya.

### **C. Tujuan Komunikasi**

Adapun tujuan komunikasi secara umum dikemukakan oleh Wiryanto (2014), yaitu:

1. Alat kendali

Fungsi komunikasi sebagai alat kendali atau kontrol dalam hal ini berarti dengan komunikasi maka perilaku individu dapat dikontrol dengan penyampaian aturan yang harus dipatuhi.

2. Alat motivasi

Komunikasi yang baik dan persuasif adalah komunikasi yang dapat meningkatkan motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Menyampaikan informasi yang dapat diraih dalam kehidupan akan membangun motivasi seseorang (Wiryanto, 2014).

3. Ungkapan emosional

Berbagai perasaan di dalam diri seseorang dapat diungkapkan kepada orang lain dengan cara berkomunikasi. Emosi ini bisa perasaan senang, kecewa, marah, gembira dan lain-lain.

4. Alat komunikasi itu sendiri.

### **D. Syarat Komunikasi**

Berkomunikasi dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh orang lain atau kelompok sehingga dengan informasi itu proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik. Syarat-syarat ketika melakukan komunikasi Handaka (2017) adalah:

1. *Source* atau sumber

*Source* atau sumber adalah bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh sumber komunikasi adalah orang, buku, dan lembaga.

2. Komunikator

Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, kelompok orang ataupun organisasi komunikasi seperti film, surat kabar, radio, televisi dan lain-lain.

3. Komunikan

Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi baik berupa seseorang, kelompok ataupun massa.

4. Pesan

Pesan adalah semua hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah untuk merubah tingkah laku serta sikap orang lain.

5. Saluran

Saluran adalah media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terdiri dari 2 bagian yaitu saluran formal atau resmi dan saluran informal atau tidak resmi.

6. Effect

Effect adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi.

## **E. Macam-macam Komunikasi**

Berdasarkan pendapat Daryanto (2014) manusia melakukan komunikasi dengan berbagai macam.

### **1. Komunikasi berdasarkan penyampaian**

#### 1.1. Komunikasi langsung

Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa ada batas. Contoh komunikasi langsung seperti pembicaraan antara dua orang atau lebih, wawancara, rapat, diskusi, presentasi, seminar.

#### 1.2. Komunikasi tidak langsung

Komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau dengan bantuan alat komunikasi. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara surat, WhatsApp, Line, BBM, atau media pengirim pesan lain.

### **2. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup**

Komunikasi berdasarkan informasi dibagi 5 jenis yaitu:

#### 2.1 Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang dilakukan dari bawahan ke atasan.

#### 2.2 Komunikasi ke bawah

Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi antara atasan kepada bawahan.

### 2.3 Komunikasi ke samping

Komunikasi ke samping yaitu komunikasi yang dilakukan dengan orang yang memiliki kedudukan yang sama.

### 2.4 Komunikasi satu arah

Komunikasi satu arah merupakan komunikasi dari satu pihak saja, komunikasi ini terjadi di dalam suatu lembaga yang sedang mengalami keadaan darurat, jadi harus ada satu pihak yang memberikan instruksi tertentu.

### 2.5 Komunikasi dua arah

Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Komunikasi ini berupa timbal balik antara satu orang dengan orang lain.

## 3. Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi yang efektif itu adalah:

### 3.1 *Respect*

*Respect* adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan disampaikan. *Respect* berarti rasa hormat dan saling menghargai orang lain. Manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka dapat membangun kerja sama.

### 3.2 *Empathy*

Komunikasi yang efektif mudah tercipta jika komunikator memiliki sikap *empathy*. *Empathy* adalah kemampuan seorang komunikator dalam memahami dan menempatkan dirinya pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Syarat utama memiliki sikap *empathy* adalah kemampuan untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Komunikasi dengan memahami dan mendengar orang lain dapat membangun keterbukaan dan kepercayaan dalam membangun kerjasama dengan orang lain. Sikap *empathy* akan memampukan seseorang untuk dapat menyampaikan pesan dengan cara dan sikap yang akan memudahkan penerima pesan menerimanya.

### 3.3 *Audible*

*Audible* yaitu dapat didengar atau dimengerti dengan baik. *Audible* merupakan pesan yang disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Penyampaian informasi agar mudah diterima dapat menggunakan media yang cocok, sehingga penerima pesan mengerti apa yang disampaikan oleh pemberi informasi atau komunikator.

### 3.4 *Clarity*

*Clarity* adalah kejelasan dari pesan sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. *Clarity* dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dengan mengembangkan

sikap terbuka, maka dapat menimbulkan rasa percaya penerima pesan terhadap pemberi informasi.

### 3.5 *Humble*

*Humble* adalah sikap rendah hati seseorang untuk membangun rasa saling menghargai. Prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Komunikasi untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Seseorang agar dapat berkomunikasi efektif dengan seseorang harus mengerti pengaruh dari perkembangan usia baik dari sisi bahasa maupun proses fikir dari orang lain tersebut. Setiap tahap perkembangan atau umur yang berbeda mempunyai tingkat kemampuan memahami maksud dari isi komunikasi yang disampaikan.

### 3.6 Persepsi

Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kejadian dan dibentuk oleh harapan atau pengalaman. Perbedaan persepsi antara kedua pihak dapat mengakibatkan terhambatnya komunikasi.

### 3.7 Nilai

Nilai merupakan standar yang mempengaruhi perilaku sehingga penting bagi seseorang untuk menyadari nilai yang dipercayai seseorang.

### 3.8 Latar belakang sosial budaya

Bahasa dan gaya komunikasi dipengaruhi oleh faktor budaya. Budaya ini juga membatasi cara bertindak dan berkomunikasi.

### 3.9 Emosi

Emosi adalah perasaan subjektif terhadap suatu kejadian. Ekspresi emosi seperti sedih, senang, dan terharu dapat mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi.

### 3.10 Jenis kelamin

Setiap jenis kelamin memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Jenis kelamin wanita dan laki-laki mempunyai perbedaan gaya komunikasi.

### 3.11 Pengetahuan

Seseorang dengan tingkat pengetahuan rendah sulit berespon dengan pertanyaan mengandung bahasa verbal dibanding dengan orang yang tingkat pengetahuannya tinggi.

### 3.12 Peran dan hubungan

Gaya komunikasi sesuai dengan peran dan hubungan antara orang yang berkomunikasi. Seseorang dalam berkomunikasi dengan teman sejawat akan berbeda ketika berkomunikasi kepada orang lain.

### 3.13 Lingkungan

Lingkungan interaksi akan mempengaruhi komunikasi yang efektif. Lingkungan yang berisik dan tidak ada privasi pasti akan mengganggu proses komunikasi.



### 3.14 Jarak

Jarak mempengaruhi komunikasi efektif. Dengan jarak tertentu memberikan rasa aman, kejelasan pesan dan kontrol ketika berkomunikasi.

## 4. Pelaksanaan Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif dapat dilakukan secara:

### 4.1 Verbal

Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang disampaikan secara lisan. Komunikasi verbal dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana komunikasi seperti telepon. Kelebihan dari komunikasi verbal yaitu dilakukan secara tatap muka sehingga umpan balik dapat diperoleh secara langsung dalam bentuk respon dari pihak komunikan.

### 4.2 Non verbal

Komunikasi non verbal adalah komunikasi dimana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi non verbal adalah cara yang paling meyakinkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain.

### 4.3 Tertulis

Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang penyampaian pesan secara tertulis baik manual maupun melalui media seperti email, surat, media cetak, lainnya.

## **5. Prinsip Komunikasi**

Prinsip-prinsip komunikasi tertulis, yaitu lengkap, ringkas, pertimbangan, konkrit, jelas, sopan, dan benar. Hal-hal yang diperhatikan dalam komunikasi tertulis:

1. Penulisan instruksi harus dilakukan secara lengkap dapat terbaca dengan jelas agar sumber instruksi dapat dilacak bila diperlukan.
2. Penulisan harus menuliskan nama lengkap, tanda tangan penulis pesan serta tanggal dan waktu penulisan.
3. Hindari penggunaan singkatan, akronim dan simbol yang berpotensi menimbulkan masalah.

## **F. Pemberdayaan Masyarakat**

Dewasa ini banyak nuansa pemahaman terhadap konsep pemberdayaan dalam pembangunan. Konsep pemberdayaan merupakan upaya mencari bentuk konsep pembangunan yang ideal setelah berbagai paradigma pembangunan sebelumnya yang gagal memenuhi harapan sebagian besar umat manusia. Friedman (1992), mengatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan paradigma terakhir dari konsep pembangunan manusia yang kemunculannya disebabkan oleh karena adanya dua permasalahan, yakni : kegagalan dan harapan, yaitu gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dengan harapan-harapan adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan lain konsep pemberdayaan dikemukakan oleh Narayan (2002) menjelaskan "*Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to participate in, negotiate with, influence, control, and hold accountable institutions that affect their lives*". Pemberdayaan dimaknai sebagai sebuah intervensi yang merupakan suatu upaya untuk memperkuat sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya agar dapat menentukan sendiri masa depannya. Definisi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bertujuan untuk melakukan proses perubahan agar masyarakat memahami manfaat dan peranannya dalam program pembangunan, mampu merumuskan kebutuhan dengan potensi/sumberdaya yang dimiliki, mampu menentukan prioritas masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan kebutuhan dan potensinya, serta mampu menyusun rencana kegiatan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Mengingat pemberdayaan sebagai suatu proses, maka implementasi pemberdayaan mengedepankan proses daripada hasil (*output*). Menurut Ife (1995), bahwa terdapat tiga strategi dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu melalui kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, pendidikan dan penyadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi

sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan kesadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaannya.

Sumodiningrat (2009), menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan umum (universal) dan pendekatan khusus (ideal). Dengan pendekatan umum, bantuan baik berupa dana, prasarana, dan sarana diberikan kepada semua daerah dan semua penduduk secara merata. Pendekatan ini keuntungannya adalah mudah diterapkan. Namun, pendekatan ini sangat mahal dan mempunyai resiko kebocoran yang cukup tinggi. Sedangkan dengan pendekatan khusus, bantuan diberikan kepada penduduk atau daerah yang benar-benar memerlukan, dan kebocoran dapat ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan pendekatan ini, perencanaan dalam penggunaan bantuan ditentukan sendiri oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa konsep komunikasi pemberdayaan di atas, maka dalam usulan penelitian ini model komunikasi pemberdayaan dibatasi pada upaya model komunikasi pemberdayaan orang asli papua 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu suku muskona, suku sough, suku sebyar, suku kuri, suku irarutu, suku wamesa dan suku sumuri, Sehingga dalam memahami komunikasi dalam pemberdayaan orang asli Papua sebagai aktivitas yang meletakkan proses sebagai kunci utama mencapai tujuan

yang hendak dicapai terhadap pemberdayaan orang asli Papua sebagai resolusi konflik.

## **G. Komunikasi dan Pemberdayaan**

Dalam pelaksanaannya, Narayan (2002) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan keberdayaan suatu komunitas didukung oleh beberapa elemen berikut:

### **1. Akses Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan. Kekuasaan di sini tidak didefinisikan secara harfiah begitu saja, melainkan pengertian kekuasaan ini merupakan kemampuan masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk memperoleh akses dan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya. Komunikasi memberikan khasanah dan wawasan baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Komunikasi ini tidak hanya berupa kata-kata yang tertulis, namun dapat pula diperoleh melalui diskusi kelompok, puisi, cerita, debat, teater jalanan, dan opera jalanan dalam bentuk yang berbeda-beda secara kultural dan biasanya menggunakan media seperti radio, televisi, dan internet.

Penggunaan media tersebut merupakan akses komunikasi massa, McQuail's dalam bukunya *Mass Communication Theory* (2010), menekankan pada permasalahan yang menyangkut media, masyarakat dan budaya. Dalam konsepnya peringkat proses komunikasi masyarakat terbentuk berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi sosial dimana

komunikasi terjadi. Setiap tingkatan proses komunikasi mencakup sejumlah masalah dan prioritas tertentu serta memiliki serangkaian kenyataan.

Tingkatan proses komunikasi menurut McQuail dari yang terbawah yakni tingkatan intrapersonal hingga teratas yakni tingkatan masyarakat luas, seperti komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi, komunikasi intragroup, komunikasi, komunikasi institusi atau organisasi misalnya sistem politik atau organisasi bisnis serta komunikasi massa atau jaringan masyarakat luas.

Berdasarkan pandangan tersebut maka media komunikasi massa sebagai akses komunikasi tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sehingga komunikasi massa dapat dipengaruhi oleh kebudayaan dan peristiwa sejarah, termasuk tantangan teknologi baru.

Selain itu McQuail (1987), pernah mengungkapkan bahwa karakteristik komunikasi massa bahwa yang menjadi komunikator dalam komunikasi massa adalah suatu organisasi formal, seperti pemerintah dapat mengirim pesan kepada khalayak ramai atau masyarakat yang memiliki hubungan satu arah, impersonal, non-moral, tidak simetris, kalkulatif atau manipulatif dengan terdapat jarak fisik dan jarak sosial antara pengirim dan penerima. Selain itu komunikator harus bersifat netral dan tidak condong pada pengaruh tertentu, serta penerima merupakan bagian dari khalayak luas yang anonim.

Selanjutnya pesan komunikasi massa dihasilkan berdasarkan standar yang berlaku yang digunakan dan diulang dalam bentuk identik, pesan bersifat tidak unik, beragam dan dapat diperkirakan, sehingga komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak antara satu pengirim dengan banyak penerima.

Selain itu komunikasi massa dapat menciptakan pengaruh luas dalam waktu singkat dan akan menimbulkan respon seketika dari banyak orang secara serentak, sehingga sangat efektif apabila komunikasi massa disampaikan oleh orang yang tepat, pada waktu tertentu dengan cara atau model yang tepat pula.

Menurut McQuail, jika teori diartikan tidak hanya sebagai sebuah sistem proposisi yang mirip aturan hukum, melainkan sebagai beberapa perangkat gagasan sistematis yang dapat membantu untuk menjelaskan atau menafsirkan sebuah fenomena atau memandu tindakan atau memprediksi konsekuensi yang mungkin timbul, maka kita dapat membedakan lima jenis teori yang berkenaan dengan komunikasi massa sebagai berikut:

#### 1.1 Teori ilmu pengetahuan sosial

Teori pengetahuan sosial mengusulkan berbagai pernyataan umum yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan efek komunikasi massa yang berdasarkan pengamatan terhadap media dan sumber terkait lainnya yang dilakukan secara sistematis, yang dapat diuji dan divalidasi atau

bahkan ditolak dengan menggunakan metode serupa. Teori ilmu pengetahuan sosial bersumber dari kenyataan tentang media.

Jenis teori ini seringkali tergantung pada teori ilmu pengetahuan sosial lainnya seperti sosiologi, psikologi, dan politik. Beberapa teori menekankan pada pemahaman tentang apa yang terjadi, beberapa teori lainnya menekankan pada pengembangan sebuah kritik, dan beberapa teori lainnya lagi menekankan pada aspek praktis dalam proses informasi publik atau persuasi (McQuail, 1987; McQuail, 2010).

Contoh teori yang termasuk ke dalam jenis teori ini adalah teori efek media massa seperti model stimulus-respon, teori jarum hipodermik, teori *uses and gratifications*, teori kultivasi, teori spiral keheningan, teori kesenjangan pengetahuan, dan teori agenda setting. Contoh lainnya adalah terkait dengan teori media massa seperti teori masyarakat massa, pandangan klasik Marxisme, teori politik ekonomi, teori kritik aliran Frankfurt, teori hegemoni media (hegemoni media massa), pendekatan sosial budaya, dan pendekatan fungsionalis struktural.

## 1.2 Teori budaya

Teori budaya memiliki karakteristik yang beragam. Dalam beberapa bentuk, teori budaya bersifat evaluatif, berusaha untuk membedakan artefak budaya sesuai dengan beberapa kriteria kualitas. Terkadang memiliki tujuan hampir berlawanan, berusaha untuk menantang klasifikasi hierarkis karena tidak relevan menjadi signifikansi sebenarnya dari budaya (McQuail, 2010).



### 1.3 Teori normatif

Teori normatif lebih menekankan pada masalah bagaimana seharusnya peran media massa bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut. Jenis teori ini penting karena teori normatif memang berperan dalam membentuk institusi media dan berpengaruh besar dalam menentukan sumbangsih media, sebagaimana yang diharapkan oleh publik media itu sendiri dan organisasi serta para pelaksana organisasi sosial itu. Beberapa penelitian terkait media massa telah menstimulasi keinginan untuk menerapkan berbagai norma sosial dan penampilan budaya.

Teori-teori normatif masyarakat menekankan pada kepemilikan media yang umumnya ditemukan dalam hukum, regulasi, kebijakan media, kode etik, dan substansi debat publik. Walaupun teori normatif media sendiri tidak obyektif, namun teori normatif media dapat dikaji dengan menggunakan metode ilmu-ilmu sosial yang obyektif (McQuail, 1987; McQuail, 1992, McQuail, 2010). Adapun yang termasuk ke dalam teori normatif adalah teori pers yang terdiri dari teori otoritarian pers, teori pers bebas yang berakar dari teori liberalisme, teori tanggung jawab sosial, teori media soviet, teori media pembangunan, dan teori demokratik-partisipan.

### 1.4 Teori operasional

Pengetahuan tentang media dapat digambarkan secara lebih baik dengan teori operasional karena teori operasional merujuk pada berbagai gagasan praktis yang dirumuskan dan diterapkan oleh para praktisi media.

Ragam teori ini juga disebut dengan teori praktis karena menyuguhkan penuntun tentang tujuan media, cara kerja yang seharusnya diterapkan agar seirama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak, dan cara-cara pencapaian beberapa sasaran tertentu.

Beberapa hal yang dikandungnya berkenaan dengan konsep teknik pelaksanaan yang bersumber dari tradisi, penerapan profesional, norma-norma, dan kebiasaan yang mengarahkan cara kerja produksi media. Semua itu menuntun media agar tetap berjalan secara taat asas dari waktu ke waktu. Contohnya adalah terkait dengan kode etik media dan kode etik wartawan.

#### 1.5 Teori akal sehat

Teori akal sehat merujuk pada seluruh pengetahuan yang kita miliki yang diperoleh dari pengalaman pribadi dengan media. Dasar teori akal sehat adalah kemampuan membuat pilihan yang konsisten, mengembangkan pola rasa, membentuk gaya hidup dan identitas sebagai konsumen media. Teori akal sehat juga mendukung kemampuan untuk membuat penilaian kritis. Kesemuanya ini membentuk apa yang media tawarkan kepada khalayak dan merancang arah serta pengaruh media.

Cara kerja teori akal sehat dapat kita lihat dalam norma-norma penggunaan media (McQuail, 1987; McQuail, 2010). Contohnya adalah teori *uses and gratifications* yang berasumsi bahwa kita menggunakan media tertentu karena didorong oleh berbagai kebutuhan dan motivasi

tertentu. Perbedaan dalam pemilihan media berakibat pada perbedaan pola terpaan dan efek yang terjadi pada khalayak.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Sulistiyani (2017: hlm 80), tujuan yang dicapai dari pemberdayaan yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif, kondisi kognitif pada hakekatnya kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Tujuan dari pemberdayaan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa:

“Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.

Sedangkan menurut Suharto (2017: hlm 60), mengatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah tidak memiliki ketidakberdayaan baik karena masalah internal (misalnya

persepsi mereka sendiri), maupun karena masalah eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).

Menurut Theresia (2015 : hlm 153) tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan diantaranya:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk kelembagaan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan usaha (*better business*), perbaikan pendidikan atau semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (*better income*) dengan terjadi perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki dari segi pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan lingkungan (*better improvement*) perbaikan pendapatan bisa langsung berdampak pada segi lingkungan yang ditempati baik fisik maupun sosial. Karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaannya kehidupan yang lebih baik yang didukung lingkungan fisik maupun sosial yang baik pula diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

### 3. Tahapan-Tahapan Pemberdayaan

Menurut Khan (1997) dalam Bakri (2017), pemberdayaan dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang digambarkan dalam sebuah model *empowerment*. Model-model dan tahapan-tahapan dalam pemberdayaan itu sebagai berikut:

1. *Desire*

Pemberdayaan tahapan pertama adalah *desire* (pendelegasian) adalah adanya pendelegasian dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mendelegasikan dan melibatkan masyarakat.

2. *Trust*

Tahap *trust* (membangun kepercayaan) yaitu dimana adanya keinginan dari manajemen dalam hal ini pemerintah untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat.

3. *Confident*

Tahap ketiga adalah saling percaya yaitu dimana adanya tindakan yang dapat menimbulkan rasa percaya diantara pemerintah dan masyarakat dengan menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki masyarakat.

#### 4. *Credibility*

Tahap keempat yaitu adanya keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk menjaga kredibilitas dengan cara pemberian penghargaan dan pengembangan masyarakat.

#### 5. *Accountability*

Tahap ini merupakan tahap keinginan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap wewenang yang diberikan.

#### 6. *Communication*

Tahapan terakhir yaitu kegiatan dari pihak manajemen dalam hal ini pemerintah untuk mengadakan komunikasi yang saling terbuka untuk menciptakan suatu keadaan yang saling memahami antara masyarakat dan pemerintah.

### **4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Parsons et.al. (1994: hlm 112-113) dalam Suharto (2017: hlm 66), menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perorangan. Beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem di luar dirinya. Konteks

perjalanan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu secara bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis*, *intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan kepada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem aras memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

## **5. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut beberapa penulis seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989) dalam Suharto (2017: hlm 68), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial.

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerja sama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan mampu menguasai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.



7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif: permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

## **6. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2013: hlm 125) proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari:

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaannya, baik potensi ataupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya, persiapan penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan

kajian dan penilaian keadaan, dan pembahasan hasil serta penyusunan rencana tindak lanjut.

## 2. Menyusun rencana kegiatan

Berdasarkan hasil kajian meliputi memprioritaskan dan menganalisis masalah-masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Identifikasi sumber masalah yang tersedia untuk pemecahan masalah, dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaannya.

## 3. Implementasi kegiatan

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendampingan selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan dengan memperhatikan realisasi dan tujuan awal. Rangkaian kegiatan ini termasuk pelaksanaan pemantauan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian, selain itu perbaikan jika diperlukan.

## 4. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara mendalam pada tahapan pemberdayaan dengan tujuan agar prosesnya berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan baik prosesnya maupun hasil dan dampak agar dapat disusun proses perbaikan bila diperlukan.

## **Pengembangan kapasitas**

Pengembangan kapasitas sampai saat ini cukup beragam didefinisikan oleh para ahli dengan alasan bahwa pengembangan kapasitas

menurut Selepole (2018: hlm 4), merupakan konsep yang sangat universal dan memiliki dimensi beragam. Menurut Morgan (Soeprapto: 2010, hlm 10) dalam Selepole (2018: hlm 5), pengembangan kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sector, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Gandara, 2008 : hlm 9) bahwa *capacity building* dalam Selepole (2018 : hlm 5) merupakan sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu definisi *capacity building* biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau individu-individu dalam pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur (sumber daya manusia) untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan keputusan-keputusan secara efektif melalui peningkatan pemahaman, keterampilan dan kemampuan.

### **Tujuan pengembangan kapasitas**

Menurut Selepole (2018: hlm 7) tujuan pengembangan kapasitas dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Secara umum diidentikkan pada perwujudan berkelanjutan suatu sistem;
2. Secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik yang dapat dilihat dari beberapa aspek.
3. Efisiensi dalam hal waktu dan tenaga (sumber daya) yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan.
4. Efektifitas berupa kepatutan yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.
5. Responsitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tertentu.
6. Pembelajaran yang berdampak pada kinerja individu kelompok, organisasi dan sistem.

### **Proses pengembangan kapasitas**

Proses pengembangan kapasitas berkaitan dengan strategi menata input (masukan) dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome* secara optimal, serta menata *feedback* sebagai langkah perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata masukan berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dan non sumber daya manusia sehingga siap untuk digunakan bila diperlukan. Strategi menata proses berhubungan dengan

kemampuan organisasi dalam mendesain, memproses dan mengembangkan seperangkat kebijakan, struktur organisasi dan manajemen. Strategi menata umpan balik berkaitan dengan kemampuan organisasi melakukan perbaikan secara berkesinambungan melalui evaluasi hasil yang telah dicapai, dan mempelajari kelemahan atau kekurangan yang ada pada masukan, proses, dan melakukan tindakan penyempurnaan secara nyata dengan melakukan berbagai penyesuaian lingkungan yang terjadi. (Haryanto, 2014: hlm 26).

Menurut Suharto (2017: hlm 65) indikator keberdayaan yaitu:

1. Kekuasaan di dalam: meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah.
2. Kekuasaan untuk: meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.
3. Kekuasaan atas: perubahan hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.
4. Kekuasaan dengan: meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro.

### **Karakteristik pengembangan kapasitas**

Menurut Gandara (2008: hlm 16) dalam Selepole (2018: hlm 8), pengembangan kapasitas dapat dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Merupakan sebuah proses yang berkelanjutan.
2. Memiliki esensi sebagai sebuah proses internal.
3. Dibangun dari potensi yang telah ada.
4. Memiliki nilai intrinsik tersendiri.
5. Mengurus masalah perubahan.
6. Menggunakan pendekatan terintegrasi dan holistik.

Ciri-ciri di atas, dapat dimaknai bahwa peningkatan kapasitas bukan proses yang berangkat dari ketiadaan, melainkan berawal dari membangun sebuah potensi yang sudah ada dan kemudian diproses untuk meningkatkan kualitas baik secara individu, kelompok, organisasi serta sistem agar dapat bertahan di tengah lingkungan yang mengalami perubahan secara terus menerus.

Peningkatan kualitas yang dimaksud bukan hanya ditujukan pada suatu komponen atau bagian dari sebuah sistem saja melainkan diperuntukkan bagi seluruh komponen yang bersifat satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau saling terkait antar bagian-bagian yang ada dalam sebuah sistem yang mencakup multi dimensi bersifat dinamis. Konsep dasar dari pengembangan kapasitas ini yaitu pembelajaran, namun penerapannya dapat diukur sesuai dengan tingkat pencapaiannya, apakah diperuntukkan dalam jangka waktu yang pendek, menengah atau panjang, dimana proses pada tingkatan yang terkecil berkaitan dengan pembelajaran dalam diri individu, kemudian pada tingkat kelompok, organisasi dan sistem

yang juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan lingkungan pembelajaran.

### **Faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas**

Faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pembangunan kapasitas (*capacity building*) dalam pemerintah desa. Namun secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi lima yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekurangan dan kelemahan yang dimiliki (Djumandi, 2006: hlm 154-156 dalam Selepole, 2018: hlm 14), antara lain:

1. Komitmen bersama (*collective commitments*) dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi (termasuk pemerintah desa), hal ini sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus menerus ditumbuhkembangkan dan dipelihara secara baik karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya sebuah komitmen yang baik dari pemimpin tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharapkan program pengembangan kapasitas untuk bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik.
2. Kepemimpinan (*leadership*). Faktor kepemimpinan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan

kesuksesan program pengembangan kapasitas. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, harus terus menerus didorong oleh mekanisme kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat dan realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik, selain itu gaya kepemimpinan merupakan salah satu pendorong sebuah efektifitas suatu kelompok organisasi.

3. Reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintah desa di Indonesia serta aparatur desa yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta faktor formal prosedural merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh sebab itu, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan maka reformasi peraturan merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini.
4. Reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian yang penting dari reformasi kelembagaan. Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas individu dan kelembagaan menuju pada realitas tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif



dalam menopang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan desa di Indonesia.

5. Pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.
6. Pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pemerintah desa melalui pengelolaan sistem informasi Kampung.

#### **H. Teori Resolusi Konflik Johan Galtung**

Mengutip Tubagus (2001), Galtung menawarkan tiga model resolusi konflik yaitu *peace keeping*, *peace building*, dan *peace making*. Model *peace keeping* (menjaga perdamaian) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindarkan penularan konflik terhadap kelompok lain. *Peace building* (membangun perdamaian) adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara

membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas.

Lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan *peace building*, yaitu :

1. Interaksi terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status
2. Lingkungan sosial yang mendukung
3. Komunikasi yang terjadi merupakan komunikasi intim bukan kasual
4. Kedua pihak harus senang dengan proses komunikasi
5. Ada tujuan bersama yang hendak dicapai

*Peace making* (membuat perdamaian) adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Dua metode yang dapat dipilih pada tahapan negosiasi adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan
2. Hukum atau pendekatan konvensional

Pendekatan hukum efektif dilakukan oleh pemerintah sebagai organisasi yang memiliki legitimasi. Negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara apabila tanpa legitimasi. Hal tersebut juga termasuk rekonsiliasi sebagai bagian dari resolusi konflik. Pendekatan konvensional pasti gagal apabila negara tidak memiliki legitimasi. Alternatif solusi harus dicari melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai upaya penyelesaian konflik dengan cara langsung mengarah pada persoalan inti atau utama. Model tersebut dikenal juga sebagai *Interactive Conflict Resolution*.

Ketiga kerangka model resolusi konflik Galtung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

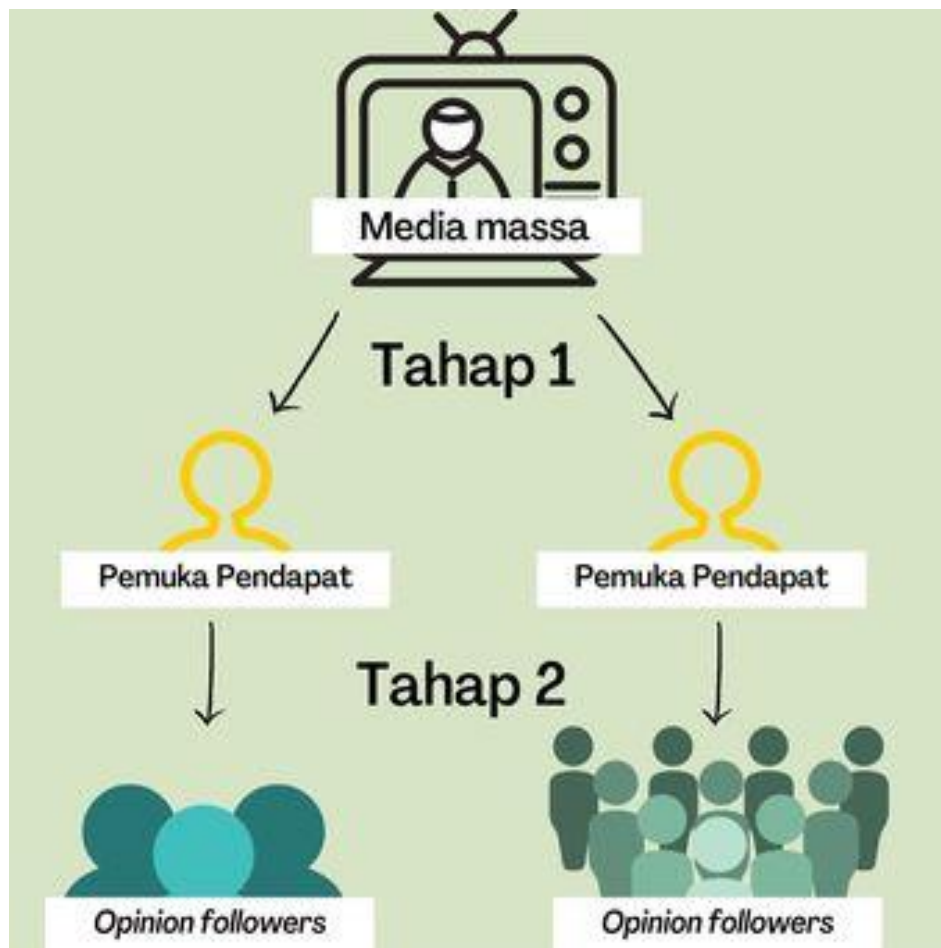
**Tabel 2.1 Kerangka Resolusi Galtung**

Masalah	Strategi	Target
Kekerasan	<i>Peace keeping</i> (aktivitas militer)	Kelompok pejuang atau para militer
Pertentangan Kepentingan	<i>Peace making</i> (aktivitas politik)	Pemimpin atau toko
Struktur sosial ekonomi dan sikap negatif	<i>Peace building</i> (aktivitas Sosial ekonomi)	Masyarakat umum (pengikut)

Sumber : Tubagus Arif Faturahman, 2001

### **I. Teori *Two Step Flow* (Teori Komunikasi Dua Tahap)**

Teori *two step flow* atau teori komunikasi dua tahap berasal dari Paul Lazarsfeld, Berelson, dan Hazel Gaudet (1948) yang dikembangkan oleh Elihu Katz pada Tahun 1955. Secara garis besar, teori ini menjelaskan tentang efek media massa terhadap masyarakat, efek yang dimaksudkan tersebut tidak mempengaruhi pilihan atau sikap masyarakat secara langsung sebagaimana diungkapkan oleh Vanya Karunia Mulia Putri (2021).



**Gambar 2.1 Two Step Flow Modle**

Sumber: Vanya Karunia Mulia Putri (2021)

Berdasarkan penelitian bahwa ide-ide sering kali datang dari surat kabar dan radio yang didapat oleh pemuka pendapat (*opinion leader*) dan dari mereka ini berlalu menuju penduduk yang kurang giat. Tahap pertama adalah dari sumbernya, yakni komunikator kepada pemuka pendapat yang mengoper informasi, sedang tahap kedua ialah dari pemuka pendapat kepada pengikut-pengikutnya, yang mencakup pengaruh penyebaran (Onong Uchjana, 2000:85).

Laju perkembangan komunikasi massa begitu cepat dan memiliki bobot nilai tersendiri pada setiap sisi kehidupan sosial budaya yang sarat dengan perubahan perilaku masyarakat. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Pengaruh media komunikasi massa melalui model satu tahap menganggap khalayak mengalami perubahan sikap setelah melihat pesan media secara langsung tanpa melalui perantara yaitu *opinion leader* (pemimpin pendapat). Paul Lazarsfeld bersama Bernard Berelson dan Hazel Gaudet dalam buku mereka yang berjudul *The People's Choice* memunculkan teori *two-step flow modle* pada tahun 1948 (lihat: Nurudin, 2004:132).

Teori yang dimunculkan oleh Lazarsfeld dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa mass media bukanlah sarana dan sebagai sumber informasi utama yang mempengaruhi penerima pesan tetapi *opinion leaders*lah yang melakukannya untuk mempengaruhi penerima pesan (lihat: Wiryanto, 2000: 23).

Teori *two-step flow modle* atau model alir dua tahap ini dapat pula menjelaskan bahwa bisa terjadi dari mass media ke *opinion leaders* dan dari *opinion leaders* ke penerima pesan dimana *opinion leaders* berfungsi sebagai perantara komunikasi bagi mass media dan penerima pesan. Namun demikian *two-step flow modle* ini masih memiliki kekurangan (lihat: Nuruddin, 2004:134) yaitu:

1. Penerima pesan sesungguhnya tidaklah pasif.

2. Orang yang menyampaikan pesan tersebut dimungkinkan juga menerima informasi yang disampaikan dari orang lain. Artinya *opinion leaders* juga bisa terpengaruh oleh followers. Jadi pengaruh pesan sering merupakan *a two-directional flow* antara *transmitters* dan *receivers*.
3. *Opinion leaders* bukanlah satu-satunya orang yang menerima informasi dari mass media. Penerima pesan juga sangat dimungkinkan terpengaruh oleh iklan.

Alur dua tahap (*two steps flow*) yang menyatakan bahwa pesan dari media massa sampai kepada khalayak melalui pemuka pendapat (*opinion leader*). Teori ini menjelaskan bahwa efek media massa terhadap masyarakat tidak terjadi secara langsung melainkan melalui perantara yaitu *opinion leader* (pemimpin pendapat).

Pemimpin pendapat menyampaikan penafsirannya di samping isi media massa. Pemimpin pendapat sangat berpengaruh dalam membujuk orang untuk mengubah perilaku dan sikap mereka ([pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-dua-tahap](http://pakarkomunikasi.com/teori-komunikasi-dua-tahap)). Untuk itu teori *two step flow* yang digagas oleh Katz dan Lazarsfeld menjadi teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori ini menjelaskan mengenai proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada khalayak. Menurut model ini, penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayaknya tidak terjadi secara langsung (satu tahap), melainkan melalui perantara seperti misalnya "pemuka pendapat" (*opinion leaders*). Dengan demikian proses pengaruh

penyebaran informasi melalui media massa terjadi dalam dua tahap: Pertama, informasi mengalir dan media massa ke para pemuka pendapat (*opinion leaders*); Kedua, pemuka pendapat meneruskan informasi (opini) tersebut ke sejumlah orang yang menjadi pengikutnya.

Dalam analisisnya terhadap hasil penelitian tersebut, Lazarsfeld kemudian mengajukan gagasan mengenai “komunikasi dua tahap” (*two stepflow*) dan konsep “pemuka pendapat”, temuan mereka mengenai kegagalan media massa dibandingkan dengan pengaruh kontak antar pribadi telah membawa kepada gagasan bahwa “seringkali informasi mengalir dari radio dan surat kabar kepada para pemuka pendapat, dan dari mereka kepada orang lain yang kurang aktif dalam masyarakat” (1998;190, S.Djuarsa Sendjadja). Penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang lebih serius dan re-evaluasi terhadap teori awal komunikasi massa dengan teori yang mereka kembangkan. Secara garis besar, menurut teori ini media massa tidak bekerja dalam suatu situasi kevakuman sosial, tetapi memiliki suatu akses ke dalam jaringan hubungan sosial yang sangat kompleks, dan bersaing dengan sumber-sumber gagasan, pengetahuan, serta kekuasaan.

Menurut Wiryanto dalam bukunya teori komunikasi menyatakan bahwa pesan-pesan media massa tidak seluruhnya mencapai mass khalayak secara langsung, sebagian besar berlangsung secara bertahap. Tahap pertama dari media massa kepada orang-orang tertentu di antara massa *audience (opinion leaders)* yang bertindak selaku *gate-keepers*

(penyaring pesan) dan dari sini pesan-pesan media diteruskan kepada anggota-anggota mass khalayak yang lain sebagai tahap yang kedua sehingga pesan-pesan pada media akhirnya mencapai seluruh penduduk.(Wiryanto,2000:3).

Berdasarkan uraian di atas peran dan fungsi komunikasi *opinion leader* menjadi salah satu unsur yang sangat mempengaruhi arus komunikasi. Khususnya di pedesaan, terdapat beberapa peran dan fungsi yang dilakukan *opinion leader*. Menurut Wells dan Prenskey, setidaknya terdapat beberapa peran dan fungsi *opinion leader* dalam pengambilan keputusan/kebijakan yaitu, pemberi informasi (*authority figure*), *trend setter*, dan pemberi nasihat (*local opinion leaders*).

Pengambil keputusan/kebijakan pengambil keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan. Pembuatan keputusan ini bertujuan untuk mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan dengan berbagai konflik sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara efektif dan baik.

Pemberi Informasi (*authority figure*). *Authority figure* di sini *opinion leader* berfungsi sebagai pemberi informasi, anjuran atau pengalaman pribadinya dengan tujuan untuk membantu masyarakat untuk memuaskan keinginannya.



*Opinion leader* merupakan sumber informasi yang memiliki kredibilitas tinggi karena bertujuan memberikan informasi dalam segala hal tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari saran yang mereka berikan.

Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi suatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerimanya. Jika suatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah informasi.

*Trend setter* yaitu seseorang yang pengalamannya diikuti oleh orang lain. Tokoh ini mempunyai gaya hidup untuk ditiru, meskipun tidak peduli apakah orang lain akan mengikuti gaya hidupnya atau tidak. *Trend setter* diawali dengan proses dimana adanya ide kreatif dan inovatif, kemudian ditawarkan dan dikomunikasikan kepada masyarakat umum, kemudian masyarakat akan menilainya, jika cocok dan bisa memenuhi keinginan masyarakat, maka ide tersebut akan menjadi pusat perhatian.

#### **J. Teori Pemuka Pendapat (*Opinion Leader Theory*)**

Teori Pemuka Pendapat (*Opinion Leader Theory*) dikutip dari draft buku Teori dan Model Komunikasi oleh Hafied Cangara (2024), merupakan Salah satu teori yang banyak diaplikasikan Komunikasi Pembangunan selama dekade 1960an hingga 1970an adalah teori komunikasi dua tahap (*two-step flow of communication*). Model ini pada mulanya dilakukan untuk mengetahui pilihan warga yang tinggal di Erie County, Ohio Amerika Serikat

terhadap pemilihan presiden pada tahun 1944. Penelitian ini dilakukan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan Hazel Gaudet dengan melibatkan 2400 orang responden dan 15 orang tenaga peneliti. Penelitian ini didanai oleh Rockefeller Foundation, Majalah Life, Perusahaan jajak pendapat (*polling*) Elmo Roper, dan Columbia Radio Broadcasting kemudian diterbitkan jadi sebuah buku dengan judul *The People's Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign (1944, 2021)*.

Hasil studi Lazarsfeld dkk sebagai pengembangan dari teori sebelumnya yang dibuat oleh Robert K. Merton, C. Wright Mills dan Bernard Berelson, dalam Hafied Cangara (2024) menyimpulkan bahwa efek media massa secara tidak langsung ditetapkan melalui pengaruh personal dari pemimpin opini. Mayoritas orang menerima informasi dan dipengaruhi oleh media, melalui pengaruh pribadi pemuka pendapat (*opinion leader*). Lebih lanjut Lazarsfeld dengan teman-temannya menyatakan bahwa kebanyakan orang membentuk opini mereka di bawah pengaruh pemimpin opini, yang pada awalnya dipengaruhi oleh media massa. Ide-ide mengalir dari media massa untuk pemimpin opini, dan dari mereka selanjutnya tersebar lebih luas kepada anggota masyarakat.

### **Asumsi**

Pesan-pesan media massa tidak secara langsung diterima dan diproses oleh masyarakat, melainkan terlebih dahulu disaring dan diinterpretasikan oleh para pemimpin opini, yang kemudian menyebarkan interpretasi tersebut kepada para pengikutnya. Pemuka pendapat

dipandang mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan media karena pemimpin opini dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya dari seseorang yang mereka kenal.

### **Deskripsi**

Meskipun model komunikasi dua tahap ini pada awalnya dibuat di Amerika Serikat dalam kasus pemilihan presiden (politik), namun dalam prakteknya model ini banyak diaplikasikan di negara-negara sedang berkembang, utamanya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Bidang garapannya tidak saja di bidang politik tapi juga di bidang-bidang lain seperti inovasi pertanian, kesehatan, maupun dalam kasus-kasus pengambilan keputusan lainnya dalam masyarakat pedesaan. Di berbagai negara di Asia yang struktur masyarakatnya masih banyak didominasi oleh kalangan feodal terutama di daerah pedesaan, ketergantungan masyarakat sangat tinggi pada mereka sebagai tokoh-tokoh dianggap lebih maju, lebih terbuka, melindungi dari segi keamanan dan menghidupi dari segi ekonomi. Dalam hal pengambilan keputusan, misalnya di bidang inovasi atau teknologi, pendidikan anak, penentuan jodoh (perkawinan), sampai pada pilihan politik mereka sangat tergantung pada tokoh-tokoh masyarakat yang mereka segani dan hormati. Bahkan dalam hal tertentu misalnya politik tokoh-tokoh masyarakat pemuka pendapat masih banyak ditemui dan sering dituakan oleh para pengikutnya.

Pemuka pendapat adalah orang yang mampu mempengaruhi pendapat orang lain karena posisi, keahlian, atau kepribadiannya sehingga

pilihan seseorang jadi benar. Seorang pemimpin opini disebut sebagai orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kepribadian yang dapat mempengaruhi orang lain mengenai topik apa pun. Pemuka pendapat dipandang mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan media karena pemimpin opini dipandang sebagai orang yang dapat dipercaya dari seseorang yang mereka kenal. Biasanya pemimpin opini dijunjung tinggi oleh mereka yang menerima pendapatnya. Saat ini, istilah “*influencer*” kadang-kadang digunakan sebagai sinonim untuk pemimpin opini.

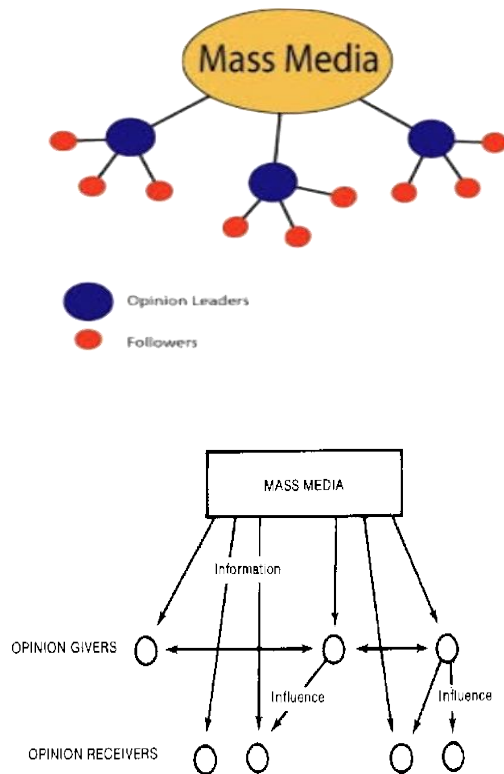
Untuk mengetahui siapa-siapa yang menjadi pemuka pendapat, menurut Everett M Rogers (1973), dalam Hafied Cangara (2024) dapat diketahui dengan 3 cara, yakni : (1) Metode Sosiometrik, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan menanyakan kepada anggota masyarakat, siapa yang selalu dimintai pendapat mereka jika menghadapi suatu masalah. Tokoh yang banyak disebut oleh masyarakat itulah yang dikategorikan sebagai pemuka pendapat. (2) *Information rating*, yaitu suatu cara yang dilakukan dengan menanyakan kepada informan-informan kunci yang tahu siapa-siapa yang jadi tokoh/pemuka pendapat diantara mereka. (3) *Seft designing method*, yaitu suatu cara yang digunakan untuk meminta kepada responden untuk menunjuk orang-orang yang berpengaruh dalam penyelesaian suatu masalah karena solusi yang diajukan.

Adapun ciri “pemuka pendapat” yang bisa diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kharismatik dan disukai oleh komunitasnya.

2. Lebih berpendidikan daripada anggota masyarakat lainnya.
3. Lebih tinggi status ekonominya.
4. Diterpa oleh media komunikasi, misalnya mudah mengakses informasi dari TV, radio surat kabar atau media sosial.
5. Kosmopolit, artinya mengetahui dunia luar selain apa yang ada di desanya.
6. Inovatif, artinya selalu gandrung pada perubahan.
7. Memiliki partisipasi sosial yang tinggi.
8. Memiliki kontak dengan agen pembaharu (komunikator pembangunan).
9. *Concern* dengan sistem budaya setempat, artinya punya kepedulian yang tinggi.
10. *Homophily* dengan lingkungan masyarakatnya.

Merton membedakan dua jenis kepemimpinan opini yakni: monomorfik *opinion leader* dan polimorfik *opinion leader*. Monomorfik *opinion leader* adalah pemuka pendapat yang memiliki satu bidang keahlian misalnya ia adalah seorang guru, sedangkan polimorfik *opinion leader* adalah pemuka pendapat yang memiliki lebih dari satu keahlian yakni selain jadi guru ia juga sebagai tokoh tani. Proses jalannya komunikasi dua tahap dimana pemuka pendapat memiliki peran sentral dalam penyebarluasan informasi dan mempengaruhi khalayak dapat dilihat dalam gambar berikut:



**Gambar 2.2. Posisi Pemuka Pendapat dalam Komunikasi Dua Tahap dan Multi Tahap**

Dari model komunikasi dua tahap ini, Lazarsfeld dan Kats memusatkan perhatian pada dampak kampanye di media, dan terkejut saat menemukan bahwa komunikasi antarpribadi mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap sikap seseorang dibandingkan dengan media massa. Selain itu, mereka menemukan bahwa individu-individu tertentu lebih sentral dan berpengaruh dalam kelompok mereka, dan seringkali bertindak sebagai perantara antara media massa dan masyarakat. Dibandingkan dengan populasi lainnya, individu-individu ini ditemukan lebih terpapar media massa. Jadi, jika pengaruh pribadi begitu penting dan dilakukan

terutama oleh individu-individu tertentu yang lebih banyak terpapar media massa dibandingkan orang-orang yang dipengaruhinya, maka dapat diasumsikan bahwa ada proses aliran dua langkah dari media ke media. pemimpin opini dan dari mereka ke pengikutnya. Para perantara ini, yang disebut pemimpin opini (*opinion leaders*), dapat membiarkan pesan-pesan disampaikan (mendukung pesan-pesan tersebut dengan otoritas pribadi mereka), memperkuat atau melemahkan pesan-pesan tersebut, atau menghalangi penyampaian pesan-pesan tersebut sepenuhnya. Ini menjadi model 'aliran komunikasi dua langkah'.

Pemimpin opini adalah seseorang yang mampu mempengaruhi pendapat orang lain karena posisi, keahlian, atau kepribadiannya sehingga pilihan seseorang benar. Seorang pemimpin opini disebut sebagai orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kepribadian yang dapat mempengaruhi orang lain mengenai topik apa pun. Mereka mempunyai keyakinan tersendiri dan menurut mereka keyakinan mereka adalah yang terbaik bagi masyarakat dan mereka cenderung mengubah pemikiran masyarakat tentang berbagai topik sosial dengan memberikan pendapatnya sendiri kepada masyarakat dan mempengaruhi pendapat orang lain. Karena mereka berkuasa, orang-orang terpengaruh oleh pemikiran mereka dan berpikir bahwa pendapat yang disampaikan oleh para pemimpin itu penting dan dapat mengubah masyarakat karena mereka sangat dipengaruhi. Pemimpin opini adalah orang yang membantu membentuk opini publik berdasarkan keunggulan, pengalaman, atau

visibilitasnya dalam kehidupan publik. Pemimpin opini dapat berupa orang atau organisasi yang ahli atau berpengaruh dalam bidang tertentu, sehingga perusahaan dan organisasi akan menggunakan pendapatnya untuk mengambil keputusan.

Studi lanjut mengenai pengaruh pribadi dan kepemimpinan opini, dilakukan 10 tahun sesudah temuan pertama, menghasilkan temuan yang memperkokoh atribut yang berkaitan dengan pemimpin opini (Katz 1957), dalam Hafied Cangara (2024 yakni :

1. Pemimpin opini terdapat di setiap tingkat sosial dan di sebagian besar bidang pengambilan keputusan, mempengaruhi orang-orang dari tingkat sosial yang sama.
2. Pemimpin opini ditemukan pada kedua jenis kelamin, semua profesi, semua kelas sosial, dan semua kelompok umur.
3. Pemimpin opini cenderung lebih terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan organisasi sosial serta menempati posisi sentral dalam jaringan pribadinya.
4. Pemimpin opini dianggap ahli di bidangnya, namun ini merupakan pengakuan informal dari teman dekat, kerabat, rekan kerja, kolega, dan kenalan.
5. Pemimpin opini lebih banyak terpapar media massa dibandingkan non-pemimpin.
6. Pemimpin opini lebih tertarik, terlibat, dan mendapat informasi terkini di bidang yang mereka pengaruhi.



7. Pemimpin opini cenderung monomorfik, yaitu mereka biasanya ahli dalam satu bidang, namun jarang dalam berbagai bidang (misalnya polimorf).
8. Pemimpin opini menunjukkan perilaku komunikasi yang spesifik sejauh mereka lebih terlibat dalam komunikasi pribadi formal dan informal dibandingkan non-pemimpin.
9. Pemimpin opini biasanya sadar betul bahwa mereka berfungsi sebagai sumber informasi dan pengaruh bagi orang lain.

Di dalam mempengaruhi warga lainnya, para pemuka pendapat ini memiliki kompetensi profesional dalam hal : (1) *External communication*: Hubungan eksternal dapat diberikan oleh pemimpin opini melalui saluran media massa atau saluran komunikasi sosial, (2) *Accessibility*: Seorang pemimpin opini harus memiliki link jaringan yang luas dan mudah diakses. (3) *Socioeconomic status*: para adopter/pengikut biasanya mencari pemimpin opini yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dari mereka. (4) *Innovativeness*: para pemimpin opini harus mudah mengadopsi ide-ide baru sebelum pengikut mereka.

Sejak diperkenalkannya model aliran dua langkah dan konsep kepemimpinan opini, banyak penelitian telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan ide-ide ini. Pada awal tahun 1970-an, beberapa ratus penelitian seperti ini telah tersedia dan jumlahnya terus bertambah (untuk tinjauan terhadap hampir 1.400 penelitian ini, lihat Weimann 1994). Dengan demikian, tahun 1960-an dan 1970-an dapat

dianggap sebagai 'Zaman Keemasan' penelitian mengenai pemimpin opini, yang menghasilkan bukti empiris yang meyakinkan mengenai konsep pemimpin opini di berbagai bidang: pemasaran dan perilaku konsumen, mode, politik dan pemungutan suara, keluarga berencana, ilmu pengetahuan. dan inovasi ilmiah, pertanian, dan perawatan kesehatan.

Ada banyak bidang di mana informasi dapat disebarluaskan secara lebih efektif ketika para pemimpin opini menjadi sasarannya. Misalnya, di bidang medis, mendeteksi pemuka pendapat telah digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan pengobatan baru dan efektif, seperti dalam pencegahan HIV atau promosi kesehatan anak. Kampanye kesadaran perubahan iklim juga mengandalkan pemimpin opini untuk menyebarkan informasi secara efektif. Identifikasi pemuka pendapat juga menjadi perhatian dalam periklanan, pemasaran, dan adopsi produk, di mana perusahaan tertarik untuk menarik klien potensial ke produk mereka seefektif mungkin. Matthew Nisbet (2009), menggambarkan penggunaan pemuka pendapat sebagai perantara antara ilmuwan dan masyarakat sebagai cara untuk menjangkau masyarakat melalui individu terlatih yang lebih dekat dengan komunitas mereka, seperti "guru, pemimpin bisnis, pengacara, pembuat kebijakan, pemimpin lingkungan, siswa, dan profesional media."

Teori ini memberikan pemahaman yang lebih berbeda tentang bagaimana pesan media membentuk opini publik. Hal ini melampaui gagasan sederhana mengenai dampak media langsung terhadap individu

dan menekankan peran mediasi dari pemimpin opini dalam proses komunikasi. Selain itu, dengan mengenali keberadaan dan pengaruh para pemuka pendapat, teori ini membantu peneliti dan praktisi mengidentifikasi individu-individu kunci yang memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk sikap dalam jaringan sosial. Kampanye politik juga dapat memperoleh manfaat dengan mengidentifikasi dan menargetkan para pemimpin opini, sebagaimana dibuktikan pada kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat George W. Bush pada tahun 2004, dalam Hafied Cangara (2024, di mana para pemimpin opini dipilih untuk mempromosikan kampanye tersebut. Mengetahui siapa pemimpin opini dapat memberikan manfaat dalam berbagai bidang, sehingga identifikasi mereka yang benar dan efisien menjadi tugas yang sangat penting.

Di Amerika Serikat dalam upaya melibatkan publik dalam isu-isu lingkungan dan nirlaba, mantan Wakil Presiden AS Al Gore dalam *The Climate Project*, menggunakan konsep pemimpin opini. Gore menemukan pemimpin opini dengan merekrut individu yang dididik tentang isu-isu lingkungan dan melihat diri mereka sebagai orang yang berpengaruh di antara teman-teman dan keluarga di komunitas mereka. Dari sana, pemimpin proyek ini melatih para pemimpin opini tentang informasi yang ingin mereka sebarkan dan memungkinkan mereka untuk mempengaruhi masyarakat. Dengan menggunakan pemimpin opini, Gore mampu mendidik dan mempengaruhi banyak orang Amerika untuk memperhatikan perubahan iklim dan mengubah tindakan mereka.

Di Indonesia, pemuka pendapat ini sering digunakan bukan hanya dalam mengenalkan inovasi baru terhadap masyarakat, tetapi juga dalam praktek-praktek politik dalam pemilihan presiden, gubernur dan kepala daerah/bupati banyak dilakukan, karena peran tokoh masyarakat baik sebagai tokoh formal seperti kepala desa maupun tokoh informal sebagai pemuka pendapat misalnya agen-agen pembangunan (dokter, mahasiswa, tokoh adat, penyuluh, pemuka agama) sangat penting dan memiliki pengaruh besar terhadap anggota masyarakat. Kesetiaan dan ketergantungan warga pada pemimpin formal dan informal termasuk pemuka pendapat masih besar pengaruhnya. Dalam hal adopsi teknologi, pemuka pendapat bisa menjadi faktor penting dalam adopsi teknologi, karena mereka mampu membentuk sikap, keyakinan, dan perilaku calon pengadopsi. Mereka dapat mengurangi ketidakpastian dan persepsi risiko dengan memberikan informasi yang andal dan dapat dipercaya mengenai fitur, manfaat, dan kelemahan teknologi baru.

### **Kritik**

Meskipun teori ini telah berpengaruh dan dipelajari secara ekstensif selama bertahun-tahun, teori pemuka pendapat sebagai turunan dari teori komunikasi dua tahap mendapat kritik karena penggambaran pengaruh media yang terlalu sederhana, definisi pemimpin opini yang terbatas, dan pengabaian terhadap faktor-faktor berpengaruh lainnya. Para peneliti sesudah Lazarsfeld dan Katz menemukan bukti kuat bahwa dengan besarnya peran pemuka pendapat maka teori ini mengabaikan kapasitas

seseorang dalam pengambilan keputusan dan keagenan dalam proses komunikasi. Hal ini mengasumsikan peran masyarakat yang relatif pasif, yang mungkin tidak mencerminkan kompleksitas perilaku manusia. Selain itu, tidak jelas apakah para pemuka pendapat dipengaruhi oleh pesan-pesan media itu sendiri atau apakah sikap dan keyakinan mereka sudah ada sebelumnya, sehingga mengarahkan mereka untuk mencari dan menafsirkan media dengan cara tertentu. Kritikus berpendapat bahwa temuan ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan dalam konteks yang lebih luas.

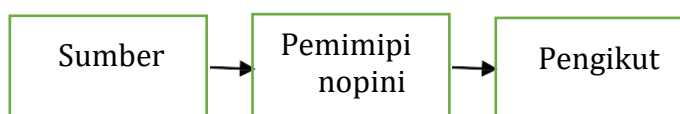
Teori pemuka pendapat berpotensi mengabaikan faktor-faktor berpengaruh lainnya dalam mempengaruhi warga, seperti status sosial-ekonomi, pengalaman, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya, yang dapat mempengaruhi konsumsi media dan penyebaran informasi. Variasi budaya dan perubahan kebiasaan konsumsi media mungkin membatasi peran pemuka pendapat secara universal. Dengan kata lain Penerapan teori komunikasi pendapat terbatas pada era digital. Teori peran pemuka pendapat dirumuskan pada era ketika media massa, seperti surat kabar dan radio, mendominasi saluran komunikasi. Di era digital saat ini, dengan adanya media sosial dan konten yang dipersonalisasi, dinamika penyebaran informasi telah berubah secara signifikan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang relevansi teori tersebut dalam konteks modern, apakah masih ada peran pemuka pendapat saat ini dan keberadaannya pada tingkatan mana.

Rogers (dalam Windham, 2009) mendefinisikan konsep *opinion leader* sebagai tingkatan dimana individu mampu untuk mempengaruhi individu yang lainnya melalui sikap atau perilaku tampak dan dianggap tepat dan dengan frekuensi yang tertentu. Rogers dan Carton (dalam Windham, 2009) mengkarakteristikan seorang *opinion leader* sebagai orang yang memberikan contoh sebuah nilai kepada orang-orang yang mengikutinya.

Burt (dalam Windham, 2009), mengemukakan bahwa seorang *opinion leader* adalah dapat digambarkan sebagai orang-orang, melalui interaksi personal, mampu membuat gagasan-gagasan atau inovasi dan membagikannya kepada orang-orang yang berkomunikasi dengannya.

Secara tidak langsung, *opinion leader* merupakan perantara berbagai informasi yang diterima dan diteruskan kepada masyarakat setempat. Pihak yang sering menjadi media exposure di masyarakat desa kadang diperankan oleh seorang *opinion leader*. Mereka ini sangat dipercaya dan dijadikan panutan serta menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat dalam segala hal.

Menurut Solomon (2007: 404), dalam Hafied Cangara (2024), proses komunikasi seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu, dalam pandangan tradisional terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.3 Model Proses Komunikasi Tradisional**

Sumber: Solomon (2007: 404)

Dalam pandangan tradisional, proses *word of mouth communication* dari informasi yang disampaikan dari sumber, kemudian informasi itu ditangkap oleh pemimpin opini yang mempunyai pengikut dan berpengaruh. Informasi yang ditangkap oleh pemimpin opini disampaikan kepada pengikutnya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Dalam proses komunikasi, pengikut tidak mampu mempengaruhi pemimpin opini sehingga dia hanya menerima informasi saja dan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin opini.

Seorang *opinion leader* berhubungan dengan *opinion leadership* (kepemimpinan pendapat). Dua istilah ini saling berkaitan karena dalam setiap kepemimpinan dibutuhkan seorang pemuka pendapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Menurut Gary Yuki, 2001: 223) dalam Hafied Cangara (2024), *opinion leader* memiliki beberapa ciri, yaitu:

1. Tingkat energi yang tinggi dan toleransi terhadap tekanan

Tingkat energi tinggi dan toleransi terhadap tekanan membantu para *opinion leader* menanggulangi tingkat kecepatan yang tinggi. Permasalahan pribadi serta kelompok yang dihadapi kebanyakan membuat seorang pemimpin tertekan. Oleh karena itu vitalitas fisik dan keuletan emosional membuatnya lebih mudah untuk menanggulangi antar pribadi yang menekan.

Seorang *opinion leader* seringkali dipaksa membuat keputusan penting tanpa informasi yang mencukupi serta kebutuhan untuk

memecahkan konflik peran dan memuaskan permintaan yang saling bertentangan oleh berbagai pihak. Pemecahan masalah yang efektif meminta kemampuan untuk tetap tenang dan tetap fokus pada masalah serta menjauhi rasa panik. Dengan begitu ia akan memberikan pengarahan yang mantap dan pasti terhadap para anggota kelompok yang lainnya.

## 2. Rasa Percaya diri

Rasa percaya diri berhubungan secara positif dengan efektivitas dan kemajuan diri sendiri. Rasa percaya diri memudahkan efektivitas kepemimpinan. Tanpa adanya rasa percaya diri yang kuat, seorang komunikator berkemungkinan lebih kecil untuk membuat upaya mempengaruhi komunikan. Sebaliknya seorang komunikator yang memiliki percaya tinggi yang kuat lebih berkemungkinan untuk memecahkan tugas dan permasalahan yang rumit. Percaya diri berhubungan dengan pendekatan yang berorientasi tindakan untuk berhadapan dengan masalah. Rasa optimis ketika menghadapi sebuah masalah akan terwujud dengan komitmen dan kegigihan dalam menyelesaikannya.

## 3. Pusat kendali internal

Orang yang memiliki pusat kendali internal yang kuat yakin bahwa peristiwa dalam hidup mereka lebih banyak ditentukan oleh tindakan mereka sendiri daripada oleh kebetulan atau kekuatan yang tidak dapat dikendalikan.



Sebaliknya, orang yang memiliki orientasi kendali eksternal yang kuat yakin bahwa peristiwa kebanyakan ditentukan oleh suatu kebetulan atau takdir dan mereka tidak dapat berbuat apapun.

Orang yang memiliki kendali internal memiliki perspektif maju ke depan sehingga kemungkinan untuk membuat suatu rencana baru untuk kemajuannya jauh lebih besar daripada orang dengan kendali eksternal. Mereka percaya dengan kemampuannya dan dapat mempengaruhi orang lain dengan bujukan bukannya manipulasi.

#### 4. Kestabilan dan kematangan emosional

Istilah kematangan emosional dapat didefinisikan dengan kematangan seseorang dalam aspek psikologis, dapat menyesuaikan diri dengan baik dan tidak menderita kekacauan psikologis yang berat. Mereka cenderung memiliki kesadaran yang lebih tepat mengenai kekuatan dan kelemahan mereka.

Orang dengan kematangan emosi tidak terlalu egosentris (memikirkan diri sendiri dan lebih memikirkan orang lain). Mereka tidak impulsif, lebih stabil dan memiliki kendali terhadap dirinya sendiri. Mereka juga dapat menerima saran dari orang lain dan bersifat lebih terbuka terhadap perubahan. Oleh karena mereka lebih banyak mempunyai hubungan baik dengan orang lain dan wawasannya jauh lebih luas.

#### 5. Integritas pribadi

Integritas adalah perilaku seseorang yang konsisten dengan nilai yang menyertainya. Pribadi yang berintegritas tinggi memiliki sifat etis, jujur,

menepati janji, tanggung jawab, konsisten dan dapat dipercaya. Indikator-indikator tersebut harus dimiliki oleh seorang *opinion leader* jika mereka berharap menjadi seseorang yang kredibel di bidang kepemimpinan.

Para komunikator akan langsung merubah sikap jika salah satu indikator tidak dipenuhi. Orang tidak akan meneruskan informasi yang penting dan sensitif jika *opinion leader*nya tidak dapat dipercaya. Seorang *opinion leader* yang berharap dapat mengilhami orang lain untuk mendukung ideologi atau visi harus menjadi contoh dalam perilakunya sendiri.

#### 6. Motivasi kekuasaan

Seringkali seseorang yang berharap akan kekuasaan yang tinggi cenderung senang untuk mempengaruhi orang lain maupun peristiwa dan besar pula kemungkinannya untuk mendapatkan posisi otoritas. Orang yang memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan akan mencari posisi dan otoritas kekuasaan serta membiasakan diri dengan organisasi atau politik.

Seseorang akan memiliki emosional yang matang apabila ia memiliki orientasi terhadap kekuasaan sosialisasi. Mereka akan menggunakan kekuasaan lebih banyak bagi orang lain dan ragu untuk memanipulasi kekuasaan tersebut.

Sifat-sifat yang dimiliki oleh orang dengan motivasi tinggi adalah, tidak terlalu egoistis, lebih defensif, tidak berorientasi mengumpulkan materi,

memiliki jangkauan pandang yang luas, bersedia menerima kritik, saran serta nasihat, dan mampu menerima keahlian orang lain secara relevan.

*Opinion leader* dalam kelompok mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian maksud dari *opinion leader* ini tergantung dari isi pesan dan *feedback* yang diharapkan dari komunikan. Selain itu faktor psikologis masing-masing *opinion leader* juga menentukan gaya dan caranya dalam mengelola penyampaian pesan.

Dalam sebuah komunikasi, umpan balik merupakan bentuk khas dari sebuah pesan. Komunikasi disebut efektif jika umpan balik yang didapatkan sesuai dengan harapan komunikator. Oleh karena itu perlu seorang komunikator yang berkemampuan untuk mendapatkan kategori komunikasi efektif.

Menurut (S. Djuarsa Sendjaja 1994: 143), dalam bukunya Teori Komunikasi, karakteristik *opinion leader* dapat dibagi menjadi 6 (enam), yaitu:

1. *The Controlling Style*

Dalam karakter *opinion leader* yang pertama adalah bersifat mengendalikan. Gaya mengendalikan ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur baik perilaku, pikiran dan tanggapan komunikan. Gaya ini dapat dikategorikan sebagai *one step flow*. Oleh karena itu *opinion leader* tidak berusaha untuk

membicarakan gagasannya, namun lebih pada usaha agar gagasannya ini dilaksanakan seperti apa yang dikatakan dan diharapkan tanpa mendengarkan pikiran dari komunikan.

## 2. *The Equalitarian Style*

Gaya ini lebih mengutamakan kesamaan pikiran antara *opinion leader* dan komunikan. Dalam gaya ini tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya setiap anggota dapat mengkomunikasikan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dengan kondisi yang seperti ini diharapkan komunikasi akan mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. *Opinion leader* yang menggunakan pola *two step flow* ini merupakan orang-orang yang memiliki sikap kepedulian tinggi serta kemampuan membina hubungan baik dengan orang lain dalam lingkup hubungan pribadi maupun hubungan kerja. Oleh karena itu akan terbina empati dan kerjasama dalam setiap pengambilan keputusan terlebih dalam masalah yang kompleks.

## 3. *The Structuring Style*

Poin dalam gaya ini adalah penjadwalan tugas dan pekerjaan secara terstruktur. Seorang *opinion leader* yang menganut gaya ini lebih memanfaatkan pesan-pesan verbal secara lisan maupun tulisan agar memantapkan instruksi yang harus dilaksanakan oleh semua anggota komunikasi. Seorang *opinion leader* yang mampu membuat instruksi terstruktur adalah orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan

verbal untuk memantapkan tujuan organisasi, kerangka penugasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul.

#### 4. *The Relinquishing Style*

Gaya ini lebih dikenal dengan gaya komunikasi agresif, artinya pengirim pesan atau komunikator mengetahui bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan (*action oriented*). Komunikasi semacam ini seringkali dipakai untuk mempengaruhi orang lain dan memiliki kecenderungan memaksa.

Tujuan utama komunikasi dinamis ini adalah untuk menstimuli atau merangsang orang lain berbuat lebih baik dan lebih cepat dari saat itu. Untuk penggunaan gaya ini lebih cocok digunakan untuk mengatasi persoalan yang bersifat kritis namun tetap memperhatikan kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut bersama-sama.

#### 5. *The Dynamic Style*

Dalam sebuah komunikasi kelompok tidak semua hal dikuasai oleh *opinion leader*, baik dalam percakapan hingga pengambilan keputusan. Bekerja sama antara seluruh anggota lebih ditekankan dalam model komunikasi jenis ini. Komunikator tidak hanya membicarakan permasalahan tetapi juga meminta pendapat dari seluruh anggota komunikasi.

Komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat atau gagasan orang lain. Komunikator tidak memberi perintah meskipun ia memiliki hak untuk memberi perintah dan mengontrol

orang lain. Untuk itu diperlukan komunikasi yang berpengetahuan luas, teliti serta bersedia bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan.

#### 6. *The Withdrawal Style*

Deskripsi konkret dari gaya ini adalah independen atau berdiri sendiri dan menghindari komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan persoalan yang tengah dihadapi oleh kelompok. Gaya ini memiliki kecenderungan untuk menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat dan produktif. Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

Sebuah kelompok adalah kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan sama untuk membangun sebuah perubahan. Kelompok merupakan bagian kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Kelompok adalah wadah untuk mewujudkan harapan dan keinginan berbagai informasi dalam hampir semua aspek kehidupan. Melihat betapa pentingnya kelompok bagi individu, kelompok dikatakan sebagai media pengungkapan persoalan-persoalan baik yang bersifat pribadi (keluarga sebagai kelompok primer) maupun yang bersifat umum (kebutuhan pengetahuan semua anggota kelompok).

Setiap individu memilih kelompoknya masing-masing berdasarkan ketertarikannya (*interest*) masing-masing. Orang yang memisahkan atau

mengisolasi diri dari orang lain adalah orang yang penyendiri, benci kepada orang lain atau dapat dikatakan sebagai orang antisosial. Semua anggota di dalam kelompok memiliki tujuan yang sama sehingga mereka bersatu dan membangun sebuah sinergi untuk mewujudkannya. Di dalam teori kepribadian kelompok, sinergi dikatakan memiliki peran penting dalam sebuah pencapaian cita-cita. Namun sinergi tidak hanya dihabiskan untuk mencapai tujuan saja tetapi juga termasuk untuk menjaga hubungan antar anggota, baik pribadi maupun umum. Dalam sebuah kelompok terdapat *opinion leader* (komunikator) dan anggota (komunikan). Fungsi seorang komunikator dapat dijabarkan dalam 8 (delapan) aspek menurut Burgoon, Heston dan Mc. Croskey. Kedelapan fungsi tersebut adalah:

#### 1. Fungsi Inisiasi

Dalam fungsi ini, seorang pemimpin harus dapat mengambil inisiatif (prakarsa) untuk gagasan atau ide baru. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman terhadap gagasan yang kurang layak. Seorang *opinion leader* mempunyai tanggung jawab atas masyarakat, oleh karena itu mereka harus berani mengambil keputusan untuk mengambil atau menolak gagasan baik yang berasal dari dirinya sendiri maupun orang lain.

#### 2. Fungsi Keanggotaan

Seseorang layak memberi sumbangsih terhadap sebuah kelompok jika ia benar-benar merupakan anggota kelompok tersebut. Oleh karena itu seorang *opinion leader* harus dapat melebur ke dalam kelompok agar dapat diterima oleh anggota yang lain. Peleburan ini dapat dilakukan dengan

banyak cara, misalnya mengikuti kegiatan rutin, berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan mengakrabkan diri di tengah-tengah kelompok.

### 3. Fungsi Perwakilan

Sebuah kelompok seringkali mendapat ancaman dari luar. Di sinilah fungsi seorang *opinion leader* untuk dapat menyelesaikan masalah agar anggota kelompok menjadi tenang kembali dan melanjutkan aktivitasnya seperti sedia kala. *Opinion leader* bertugas sebagai penengah jika anggota kelompoknya bermasalah dengan kelompok yang lain.

### 4. Fungsi Organisasi

Tanggung jawab terhadap hal-hal yang bersangkutan paut dengan persoalan organisasional, kelancaran roda *organisasi* dalam masyarakat dan deskripsi pembagian tugas ada di tangan seorang *opinion leader*, sehingga ia perlu memiliki keahlian dalam bidang mengelola organisasi dan kelompok.

### 5. Fungsi Integrasi

Dalam fungsi ini seorang *opinion leader* perlu memiliki kemampuan untuk memecahkan ataupun mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. Dengan kemampuan ini diharapkan seorang *opinion leader* dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya penyelesaian konflik dan dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.



## 6. Fungsi Management Informasi Internal

Seorang *opinion leader* harus dapat menjadi penghubung atau sarana berlangsungnya komunikasi di dalam kelompok. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian sebuah kegiatan harus dibicarakan dengan keterbukaan. Untuk itulah diperlukan seorang pemimpin untuk menjadi penghubung serta penengah jika ada kritik serta solusi untuk kegiatan tersebut.

## 7. Fungsi Penyaring Informasi

Untuk kemajuan dan perkembangan sebuah kelompok, diperlukan banyak informasi serta wawasan baru dari luar. Namun tidak semua informasi dapat diterima dan diadopsi oleh suatu kelompok. Di sinilah seorang *opinion leader* bertindak sebagai penyaring informasi baik yang masuk ataupun yang keluar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik yang dapat timbul di dalam kelompok.

## 8. Fungsi Imbalan

*Opinion leader* melakukan fungsi evaluasi dan menyatakan setuju atau tidak terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh para anggotanya. Hal ini dilakukan melalui imbalan-imbalan materi seperti pemberian hadiah atau pujian ataupun sebuah penghargaan. Kekuatan reward ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan mutu masyarakat.

## Kredibilitas Opinion Leader dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kredibilitas *opinion leader* dalam penelitian ini adalah sejumlah individu yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Mereka adalah orang-

orang yang dipercaya dan memiliki keahlian untuk menggerakkan roda kepemimpinan dalam masyarakat, misalnya tokoh masyarakat atau tokoh agama. Seseorang mendapatkan gelar tokoh agama atau tokoh masyarakat seringkali bukanlah jabatan formal, akan tetapi merupakan jabatan yang didapatkan dari opini publik.

Opini publik berperan besar dalam kedudukan dan perjalanan seorang *opinion leader*. Bisa dikatakan bahwa *opinion leader* lahir dari opini publik suatu kelompok. Opini publik akan dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap individu yang bersangkutan. Tidak hanya kepercayaan tetapi juga keahlian yang dimiliki oleh seorang *opinion leader*. Keahlian dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan keilmuannya. Jadi dapat dikatakan bahwa *opinion leader* ada karena persepsi masyarakat mengatakan seseorang itu pantas menjadi pemimpin.

#### **K. Strategi Komunikasi Program Pemberdayaan Orang Asli Papua**

Terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan orang asli Papua perlu model dan strategi komunikasi berlandaskan pada suatu metode kajian yang tepat. Terdapat berbagai jenis metode kajian yang dapat dipergunakan dalam perencanaan strategis, salah satunya dengan instrumen kajian *SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results)*.

Stavros, Cooperrider, dan Kelly (2003), yang menawarkan konsep *SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results)* yang dipopulerkan oleh David Cooperrider, dalam bukunya *Introduction to Appreciative Inquiry* (1995). Beliau sebelumnya sudah menulis dalam disertasi doktoralnya

*Appreciative Inquiry: Toward a Methodology for Understanding and Enhancing Organizational Innovation*, di Universitas Case Western Reserve, Ohio. Sehingga boleh dibilang, beliau adalah pelopor dan yang mempopulerkan pendekatan SOAR ini.

Dalam kerangka kerja SOAR, sebanyak mungkin komunikasi antar stakeholder dilibatkan, tentunya yang memiliki integritas dalam berkomunikasi sehingga dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Masalah integritas menjadi sangat penting karena para stakeholder harus menyadari asumsi-asumsi yang menjadi dasar penggerak bagi orang asli papua melalui komunikasi. Kajian SOAR terdiri dari 4 (empat) dimensi, yaitu :

1. *Strength* (kekuatan) berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang ada di dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat.
2. *Opportunity* (peluang) berkaitan dengan peluang yang terbuka di lingkungan.
3. *Aspiration* (aspirasi) berkenaan dengan konsekuensi yang mungkin atau muncul akibat dari tindakan atau tidak adanya tindakan
4. *Result* (hasil) adalah strategi yang efisien, andal, elegan, tepat sasaran dan terintegrasi.

Dalam kerangka kerja SOAR, sebanyak mungkin *stakeholder* dilibatkan, yang didasarkan pada integritas para anggotanya. Masalah integritas menjadi sangat penting karena para *stakeholder* harus menyadari asumsi-asumsi yang menjadi dasar penggerak bagi para pemimpin organisasi.



Gambar 2.4. SOAR Framework

Model analisis SOAR

S	<p><b>Strengths: What can we build on?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• What are we most proud of as an organization?</li> <li>• What makes us unique?</li> <li>• What is our proudest achievement in the last year or two?</li> <li>• How do we use our strengths to get results?</li> <li>• How do our strengths fit with the realities of the marketplace?</li> <li>• What do we do or provide that is world class for our customers, our industry, and other potential stakeholders?</li> </ul>	<p><b>Aspirations: What do we care deeply about?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When we explore our values and aspirations, "what are we deeply passionate about?"</li> <li>• Reflecting on our Strengths and Opportunities conversations, who are we, who should we become, and where should we go in the future?</li> <li>• What is our most compelling aspiration?</li> <li>• What strategic initiatives (projects, programs and processes) would support our aspirations?</li> </ul>
O	<p><b>Opportunities: What are our stakeholders asking for?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• How do we make sense of opportunities provided by the external forces and trends?</li> <li>• What are the top three opportunities on which we should focus our efforts?</li> <li>• How can we best meet the needs of our stakeholders?</li> <li>• Who are possible new customers?</li> <li>• How can we distinctively differentiate ourselves from existing or potential competitors?</li> <li>• What are possible new markets, products, services or processes?</li> <li>• How can we reframe challenges to be seen as exciting opportunities?</li> <li>• What new skills do we need to move forward?</li> </ul>	<p><b>Results: How do we know we are succeeding?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Considering our Strengths, Opportunities, and Aspirations, what meaningful measures would indicate that we are on track to achieving our goals?</li> <li>• What are 3 to 5 indicators that would create a scorecard that addresses a triple bottom line of profit, people, and planet?</li> <li>• What resources are needed to implement vital projects?</li> <li>• What are the best rewards to support those who achieve our goals?</li> </ul>
A		
R		

Gambar 2.5. Model Analisis SOAR Instrumen analisis

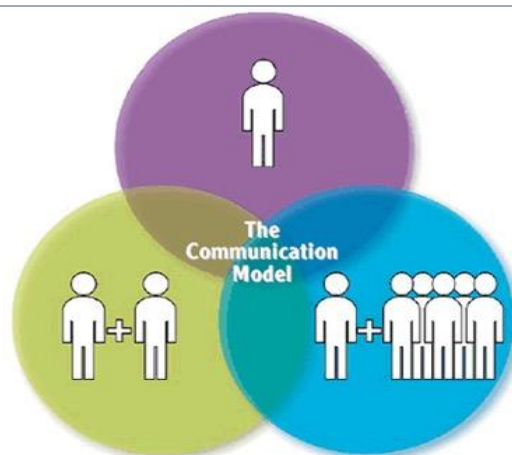
## L. Teori dan Model

Hafied Cangara (2024) dalam draft bukunya yang berjudul Teori dan Model Komunikasi, mengutip Book (1980), mendefinisikan Model ialah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, di mana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses (Book, 1980). Ada juga yang menggambarkan model sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek, di mana didalamnya dijelaskan kompleksitas suatu proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengkategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses.

Jadi model adalah representasi fisik, verbal atau grafis dari sebuah konsep atau ide. *Any symbolic representation of a thing, process, or idea.* (Littlejohn, 2016). Model dibuat untuk menyederhanakan konsep teoretis, dan ini digunakan di banyak bidang di dunia modern. Misalnya, seseorang ingin membangun rumah sesuai impiannya, dia akan menemui seorang arsitek dan menjelaskan ide-ide imajinatifnya, arsitektur dapat membuat model representasi grafis. Dengan demikian, orang tersebut akan lebih mudah memahami dan melihat dengan baik struktur rumah idamannya. Jadi model dibuat untuk memfasilitasi pemahaman secara jelas tentang fenomena, termasuk menghilangkan hal-hal detail yang tidak perlu, sehingga masalah yang begitu rumit dapat dijelaskan secara mudah dengan menggunakan model.

Biasanya, sebuah model hanya berisi bagian-bagian yang paling penting, dan juga dapat dibuat secara visual dengan menggunakan grafik, garis aliran, dan kotak. Model dapat berupa sketsa maupun struktur tergantung kebutuhan kita atau pemesan. Sebuah model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses. Misalnya, dapat melakukan spesifikasi dan menunjukkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, serta keberadaannya dapat ditunjukkan secara nyata.

Secara garis besar model dapat dibedakan atas dua macam, yaitu model operasional dan model fungsional. Model operasional menggambarkan proses dengan cara melakukan pengukuran dan proyeksi kemungkinan-kemungkinan operasional, baik terhadap luaran maupun faktor-faktor lain yang memengaruhi jalannya suatu proses. Sedangkan model fungsional berusaha menspesifikasi hubungan-hubungan tertentu di antara berbagai unsur dari suatu proses serta menggeneralisasinya menjadi hubungan-hubungan baru. Model fungsional banyak digunakan dalam pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang menyangkut tingkah laku manusia (*behavioral science*).



**Gambar 2.6. Model Komunikasi Intrapersonal**

Komunikasi interpersonal, dan komunikasi kelompok seperti halnya dengan paradigma, model juga sering disamakan dengan teori, sebab perbedaan antara teori dan model tidak terlalu jelas. L. Hawes, (1975) menyatakan bahwa kapan kita menjelaskan sebuah model maka terasa kita sudah berteori (*Theory is explanation of a Model*), Tetapi Gay (2012) berpendapat bahwa model melengapi sifat teori. Karena setiap teori harus menyertakan penjelasan terhadap model untuk meminimalkan ambiguitas. Dengan demikian, model berdiri untuk menjelaskan hubungan yang ada antara ilustrasi model dan teori itu sendiri.

Teori merupakan kerangka konseptual dari suatu gagasan atau fenomena yang tidak terwujud, sedangkan model menyederhanakan sebuah teori dengan membuat representasi fisik, simbolik, atau verbal untuk membuat pemahaman lebih jelas tentang sesuatu fenomena atau ide.

Jadi model dan teori harus dipahami sebagai dua bentuk yang digunakan dalam memahami fenomena, dan diantaranya dapat diidentifikasi beberapa perbedaan. Perbedaan utama antara model dan teori yakni teori dianggap sebagai jawaban atas berbagai masalah yang diidentifikasi terutama di dunia ilmiah, sedangkan model dianggap sebagai representasi yang dibuat untuk menjelaskan suatu teori. *It is a conceptual tool which eliminates superflous detail in existing structure or process* (Lewis, 1987). Model adalah alat konseptual yang dibuat untuk menghilangkan hal-hal kecil yang berlebihan dalam struktur atau proses yang ada.

Model memberi kita kerangka yang bisa digunakan untuk memahami masalah. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa teori merupakan sebuah konsep abstrak yang masih membutuhkan penjelasan atau pengujian. Sedangkan model hanya perlu penjelasan yang sederhana, dan tidak membutuhkan pengujian. Teori memiliki fungsi Heuristik, sedangkan model lebih kepada identifikasi dari kenyataan. Model digunakan untuk membuktikan teori, hal ini untuk menguji kebenaran dari teori tersebut dalam memprediksi fenomena. Kasarnya, teori dapat dimiliki tanpa model, tetapi model selalu didasarkan pada teori.

Menurut Moez Ltifi (2013), teori didasarkan pada pengamatan dan menjelaskan fenomena secara kualitatif, sedangkan model didasarkan pada pengukuran dan menjelaskan fenomena secara kuantitatif. Dalam arti tertentu, model tidak lebih dari terjemahan teori yang dipahami sebagai "pemikiran murni" dalam hubungan kuantitatif, dalam ruang dan waktu,



antara parameter yang dapat diukur. Secara ringkas perbedaan antara teori dan model dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.2. Perbedaan Teori dan Model**

No.	Indikator	Teori	Model
1	Definisi	Teori adalah sekumpulan ide yang memberi kita penjelasan tentang sesuatu, atau Teori adalah kerangka konseptual dari suatu gagasan.	Model adalah representasi dari sesuatu yang memberi kita struktur, atau Model adalah representasi verbal atau visual dari sebuah konsep
2	Dasar	Sebuah teori dapat digunakan untuk membuat model fisik	Sebuah model dapat meletakkan dasar untuk sebuah teori
3	Struktur	Sebuah teori dapat memberi kita sebuah struktur, tetapi ada kemungkinan bahwa itu juga tidak demikian.	Model menyediakan struktur
4	Realitas	Teori menjelaskan fenomena dan tidak berwujud	Model menyederhanakan konsep dan sebagian besar waktu itu nyata.
5	Penjelasan	Teori menjelaskan suatu fenomena, atau Teori digunakan untuk menjelaskan sesuatu dan kurang praktis	Model memberi kita pemahaman yang disederhanakan tentang suatu fenomena. Model digunakan untuk mempermudah dan lebih praktis.

Oleh karena model diartikan sebagai representasi abstrak dari sesuatu, maka masuk akal untuk menanyakan apa hubungan antara model dan teori. Menurut Wilson (2008), sebuah model dapat dibangun melalui observasi dan pencatatan perilaku dengan cara umum yang mengarah pada pengelompokan kategori aktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Model dapat dipandang sebagai pendahulu teori, sebab sebuah teori dapat diturunkan dari model, namun di sisi lain, sebuah teori juga dapat menghasilkan model untuk mengkomunikasikan gagasan secara lebih efektif.

#### **M. Penelitian yang Relevan**

Sebagai bahan perbandingan berikut ditampilkan penelitian dan penulisan mengenai penyelesaian konflik di Papua :

**Tabel 2.3. Penelitian Penanganan Konflik Sebelumnya**

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
01	Kemiskinan dan Konflik Papua di Tengah Sumber Daya yang Melimpah	Yanuarti, S.	Jurnal Politik Lipi 33-46, 2002	Membahas tentang kekayaan SDA tapi Masyarakatnya miskin sebagai penyulut konflik di Papua, perbedaannya dengan kajian ini adalah membahas tentang model komunikasi pemerintah dan opinion leader dalam memberdayakan orang asli Papua untuk menyelesaikan konflik.

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
02	Wacana Pemecahan Provinsi Papua Sebagai Issue Politik	Haris	Pascasarjana Unhas, Kosentrasi Komunikasi massa, 2004	Membahas Issue pemecahan atau pemekaran Provinsi Papua untuk meredam isuee Papua Merdeka, sedangkan penelitian saat ini menulis tentang model Komunikasi sebagai Resolusi Konflik.
03	Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua	Yulia Sugandi	Fridrich Ebert Stifung (FES), Jakarta, 2008	Menulis tentang dukungan terhadap otonomi khusus yang di mulai dengan UU No.2 Tahun 2001 tentang perlindungan orang asli papua, sedangkan penelitian ini membahas sda.
04	Otonomi Khusus Papua: Dinamika dan solusi pemecahannya.	Taufik Firmanto	Kompasiana .com. <a href="https://www.kompasiana.com/ikfirmanto">https://www.kompasiana.com/ikfirmanto</a> , 20	Membahas masalah penerapan Otonomi Khusus yang masih banyak masalah sehingga perlu solusi penyelesaiannya, sementara kajian ini sda.
05	Otonomi khusus Papua sebuah upaya merespon konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua	Muttaqin, A	E-Jurnal edisi 4. Universitas Diponegoro, 2014	Membahas tentang tujuan dikeluarkannya UU no.2 Tahun 2001, perbedaan sda.

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
06	Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Prespektif Politik	Nomen sen ST. Mambraku	FKIP UNCEN Jayapura, 2015	Menulis tentang Langkah-langkah politik untuk menyelesaikan konflik-konflik di Papua melalui Lembaga negara yang ada, perdananya sda.
07	Kekerasan dan Konflik di Papua: akar masalah dan strategi mengatasinya	Y.Y. Taum	Jurnal penelitian,19 (1),1-13, 2015	Membahas masalah akar permasalahan konflik dengan memberikan strategi penyelesaian melalui dialog, sementara kajian ini sda.
08	Studi Pemetaan Sosial dan penyusunan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Master Plan terminal BBM Jayapura	Tuti Bahfiartidkk	Penerbit :Kedai Buku jenny Budi Daya Permai Blok D1 Makassar 90245, Cetakan Pertama, 2015	Menulis tentang CSR sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini PT. Pertamina Region VIII Papua-Maluku, menganalisa kondisi sosial masyarakat terhadap Pendidikan dan keterampilan individu, termasuk peluang kerja dan berusaha termasuk pendapatan tangga sampi penyusunan <i>Community Development</i> (Comdev) untuk masyarakat sekitar perusahaan di Jayapura, sedangkan saya menulis sda.

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
09	Gerakan separatisme di Papua mengurai konflik dan solusi penyelesaian Papua-Jakarta	D. Wospakrik	<a href="https://deckywospakrik.wordpress.com/2016/09/07">https://deckywospakrik.wordpress.com/2016/09/07</a>	Gerakan separatis perlu dilakukan dialog antara Papua dan Jakarta untuk penyelesaiannya, perbedaannya sda.
10	Solusi Komprehensif menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua secara Damai, Adil dan Bermartabat	Laksamana Muda TNI (Purn) Untung Suropati	Jurnal Kajian Lemhanas RI, Edisi 37, Maret 2019	Membahas tentang Integrasi papua Tahun 1969, dan Konflik yang berkepanjangan sehingga perlu adanya solusi, sementara saya menulis sda.
11	Konflik Papua: Transformasi Konflik	Zahra A. Chairani	Kompasian a.com, 25 Desember 2019. <a href="https://www.kompasiana.com">https://www.kompasiana.com</a> .	Mengkaji tentang informasi yang menjadi sumber konflik di papua, perbedaannya dengan kajian ini sda.
12	Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi	Boy Anugrah	Jurnal Kajian Lemhanas edisi 40, Desember 2019	Menulis tentang Integrasi, Pepera, Otsus, kebijakan sedangkan saya menulis sda.

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
13	Kebijakan pemerintah Joko Widodo dan Yusup Kalla dalam upaya membangun Dialog untuk penyelesaian konflik vertical Papua tahun 2014-2019	A.H. Nugroh	Journal of Politic and Governmen t Studies (8), 2019	Membahas dialog yang dilakukan era pemerintahan Jokowi dan Yusup Kalla untuk penyelesaian Konflik Papua perbedaannya sda.
14	Kenapa Orang Pa Ingin Merdeka	Adhiat. A	<a href="https://kbr.i d/nasional/08/2019">https://kbr.i d/nasional/08/2019</a>	Membahas tentang keinginan OAP mau merdeka , sedangkan kajian ini sda.
15	Konflik Papua: Pemerintah Perlu mengubah pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis	Tanggus Chairil Wendsn ey A.Sadi	Internasion al Relation Binus University, 2020	Menulis tentang Pelanggaran HAM dan Perubahan Pendekatan dalam menyelesaikan Konflik di Papua, sedangkan saya menulis seperti poin di atas.
16	Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua	Delvia Ananda Kaisup y, Skolast	Jurnal, vol 10 Universitas Muhammad iyah Yogyakarta,	Membahas masalah penyelesaian konflik di Papua sudah cukup lama, namun perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat OAP sedangkan kajian ini sda.

No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
		ika Genap ang Maing	30 April 2021.	
17	Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik	Thomas Agung Kurnianto, Puguh Santos Anang Puji Utama	Jurnal Ilmu Kepolisian, ISSN: 2620-5025, E-ISSN:2621-8410. Volume 16.nomor 2, Agustus 2022	Ancaman NKRI, perlu metode mediasi humanistic, sementara saya menulis tentang sda.
18	Upaya-upaya Indonesia Dalam Resolusi Konflik Papua	Aurelia Angelina Djeen	Jurnal Sosio Komunika, Vol 1 no.2 November 2022	Membahas masalah upaya Indonesia menolak intervensi asing terutama negara kepulauan Solomon, dan upaya pembangunan infrastruktur, pengadaan perwakilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua, pembentukan partai local dan upaya pemekaran wilayah Papua, sedangkan kajian saya sda.

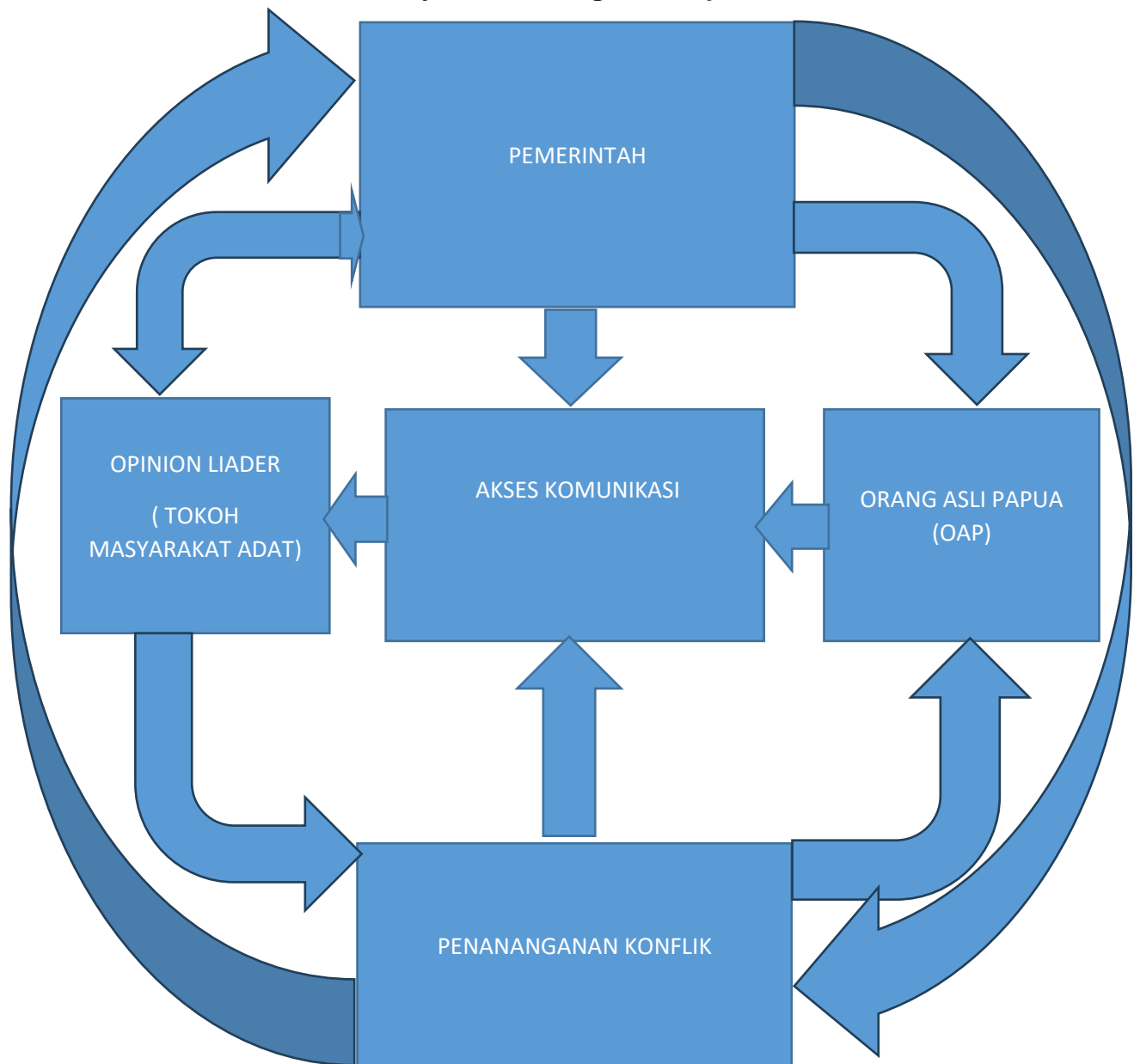
No	Judul Penulisan	Nama Penulis	Tahun Terbit	Perbedaan
19	Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian	Penny Kurnia Putri	Papua Journal Diplomacy and International Relations, volume 2, May 2022	Membahas masalah negosiasi, kesepakatan dan komitmen serta keterbukaan para pihak untuk menghentikan semua konflik setelah tercapai tujuan masing-masing, perbedaan dengan kajian ini sda.
20	Resolusi Konflik Sebagai Jalan Perdamaian di Tanah Papua	I Nyoman Sudira	<a href="https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.597482-95">https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.597482-95</a>	Menguraikan tentang penyebab umum konflik Papua, faktor struktural, faktor politik, faktor sosial/ekonomi, faktor persepsi/budaya, sehingga perlu diselesaikan dengan dialog. Perbedaan adalah sda.
21	Analisis Komunikasi Antarbudaya Dalam Proses Adaptasi Masyarakat Etnik Bugis Dan Etnik Papua Di Kota Jayapura	Ismiunia Hasmar, Jeanny Maria Fatimah, Muhammad Farid	<a href="file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2133-7411-1-PB.pdf">file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2133-7411-1-PB.pdf</a> . 2023	Membahas masalah adaptasi antara komunikasi antar budaya sementara yang peneliti tulis adalah membahas masalah komunikasi budaya dalam penyelesaian konflik



## N. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian yang dihimpun dari berbagai teori dan pendapat yang telah diungkapkan di atas, sebagaimana berikut ini.

### Model Komunikasi Penanganan Konflik Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Orang Asli Papua



Gambar 2.7 Kerangka Pikir

## O. Definisi Operasional

Berdasarkan diagram di atas, pemerintah dan *opinion leader* dengan memanfaatkan akses informasi, menggerakkan partisipasi, meningkatkan akuntabilitas publik dengan kapasitas organisasi untuk menjelaskan berbagai aspek pemberdayaan serta aset dan kapabilitas yang saling berkaitan dalam upaya mewujudkan tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Namun demikian perlu dipahami juga bahwa suatu pemberdayaan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya, kolektivitas, dan organisasi. Aset dan kapabilitas ini saling bersinergi dengan aspek pemberdayaan (informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal).

Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan memiliki peranan yang vital untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu pemberdayaan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai tahap pemberdayaan akan mendukung mereka menjadi lebih berdaya dan memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Conyers (1994) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, di antaranya adalah masyarakat akan merasa lebih dihargai apabila keterlibatan (partisipasi) mereka berpengaruh terhadap suatu kebijakan tertentu dan berpengaruh langsung terhadap apa yang mereka rasakan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah penyesuaian diri perencana sosial atau pemangku kepentingan atas apa yang penting dan

apa yang tidak penting oleh suatu komunitas. Kaum miskin tidak akan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan apabila partisipasi mereka tidak dihargai dan tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan bagi kesejahteraan mereka dan berguna dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun terdapat organisasi lokal yang kuat, hal ini tetaplah menyebabkan kaum miskin tidak memiliki akses terhadap pemerintahan lokal, sektor ekonomi swasta, dan kurangnya akses terhadap informasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat khususnya masyarakat miskin. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat ini disebut juga dengan penguatan kapasitas (*capacity building*). Penguatan kapasitas ini merupakan suatu proses dalam pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan atau merubah pola perilaku individu, organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien. Melalui penguatan kapasitas ini, maka masyarakat dapat memahami dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat dengan harapan tercipta kondisi kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera melalui strategi penguatan kapasitas adalah melalui komunikasi dan pendampingan.

Strategi atau model komunikasi dalam pendampingan sangat efektif dan efisien dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena dengan

adanya pendampingan dengan model komunikasi yang efektif maka kapasitas masyarakat dapat dikembangkan atau diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan secara tidak langsung dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas.

Dalam kaitannya dengan proses, maka partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan mutlak diperlukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adi (2003), bahwa pemberdayaan menekankan pada process goal, yaitu tujuan yang berorientasi pada proses yang mengupayakan integrasi masyarakat dan dikembangkan kapasitasnya guna memecahkan masalah mereka secara kooperatif atas dasar kemauan dan kemampuan menolong diri sendiri (*self help*) melalui model komunikasi sesuai prinsip demokratis.

Dengan menekankan pada proses, tahapan pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) sebagai berikut :

### **1. Penyadaran**

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dilakukan secara mandiri (*self help*).

### **2. Pengkapasitasan**

Pada tahap ini komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya sebelum diberdayakan. Tahap ini sering disebut sebagai

*capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

### **3. Pendayaan**

Pada tahap ini merupakan target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

Keteraturan dan kesinambungan melakukan tahapan dalam proses komunikasi pemberdayaan menjadi kunci sukses pelaksanaan aktivitas pemberdayaan. Adi (2003), menjelaskan bahwa secara umum tahapan yang dilakukan tenaga pendamping dengan model komunikasi efektif dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

#### **Tahapan Persiapan**

Tahap ini mencakup tahap penyiapan petugas dan tahap penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dalam hal ini (*community worker*) merupakan prasyarat suksesnya suatu pengembangan masyarakat.

#### **Tahapan Pengkajian (*assessment*)**

Proses *assessment* dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan) yang dirasakan (*felt needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran.

#### **Tahapan Perencanaan Alternatif Program**

Kegiatan dan tahap pemformulasian rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubah (*community worker*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

### **Tahap *Capacity Building* dan *Networking***

Tahapan ini mencakup:

1. Melakukan pelatihan, workshop, atau sejenisnya untuk membangun kapasitas setiap individu masyarakat sasaran agar siap menjalankan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.
2. Masyarakat sasaran bersama-sama membuat aturan main dalam menjalankan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem, dan prosedurnya; dan
3. Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah setempat yang dapat mendukung kelembagaan lokal.

### **Tahapan Pelaksanaan dan Pendampingan**

Pada tahapan ini melaksanakan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan bersama masyarakat sasaran, seperti:

1. Memantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
2. Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari tahapan pemberdayaan yang dilakukan.
3. Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul setiap tahapan pemberdayaan.
4. Tahap evaluasi akhir dilakukan setelah semua tahap di atas dijalankan.

Tahap evaluasi akhir menjadi jembatan menuju tahap terminasi (*phasing out strategy*).

### **Tahapan Terminasi**

Tahap terminasi dilakukan setelah program dinilai berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan berakhirnya tahap terminasi ini, maka fasilitator menyerahkan kontinuitas program kepada masyarakat sasaran sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka. Dalam tahapan di atas, dibutuhkan kesiapan dari pelaksana program pemberdayaan agar kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pengelola program membutuhkan *Community Worker* (tenaga pendamping) yang memiliki peran dalam mengawal semua proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Peranan *opinion leader* kerangka berpikir di atas mampu memberi pemahaman dan motivasi melalui model komunikasi yang baik dan dapat diterima oleh semua pihak terutama orang asli Papua, sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan Makmur di Papua. Model komunikasi yang mampu merubah perilaku dan sikap orang asli Papua dari ketertinggalan menjadi terdepan dan dari konflik menjadi damai perlu dikaji dan ditemukan untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.